

Prof. Dr. Thomas Santoso, M.Si.
Astri Yogatama, S.Sos., M.Si

SISTEM SOSIAL BUDAYA



SAGA

SISTEM SOSIAL BUDAYA

Prof. Dr. Thomas Santoso, M.Si. & Astri Yogatama, S.Sos., M.Si

Sistem sosial budaya dapat dipelajari dari pelbagai sudut pandang. Buku ini menjelaskan sistem sosial budaya dari pengertian, persyaratan, dan juga saling ketergantungan antar komponen sosial budaya. Pendekatan struktural fungsional dan konflik digunakan untuk menganalisis sistem sosial budaya yang majemuk.

Buku ini dilengkapi dengan studi kasus untuk memperdalam implementasi pemahaman tentang sistem sosial budaya dalam konteks aktivitas korporat.

SAGA

Jl. Kedondong Lor. Gg. Delima no 4A
Sundarya R0120
www.pustaka.saga.id



SISTEM SOSIAL BUDAYA

**Prof. Dr. Thomas Santoso, M.Si.
Astri Yogatama, S.Sos., M.Si**

SISTEM SOSIAL BUDAYA

Penulis:

Prof. Dr. Thomas Santoso, M.Si.
Astri Yogatama, S.Sos., M.Si

Copyright © Juni 2024
All rights reserved

ISBN: 978-623-8455-83-6

Layout: Nimas Brantandari

Penerbit:

PT. Pustaka Saga Jawadwipa
Jl. Kedinding Ior Gang Delima No.4A Surabaya
Nomor Kontak: 085655396657

Anggota IKAPI:

No. 367/JTI/2023

Buku ini dilindungi oleh Pasal 113 UU Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku tanpa izin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Sistem Sosial Budaya merupakan mata kuliah yang diajarkan pada program studi yang memerlukan mata kuliah berwawasan sosial, budaya, dan ekonomi. Memahami dinamika masyarakat sangat penting untuk mengimplementasikan berbagai jenis ilmu pengetahuan. Sampai saat ini, buku yang tersedia untuk mata kuliah tersebut sangatlah terbatas. Oleh karena itu, buku ini disusun dan diharapkan dapat membantu pemahaman mahasiswa.

Penulis menyadari bahwa buku ini tidaklah cukup untuk memenuhi pengetahuan mahasiswa untuk memahami Sistem Sosial Budaya yang demikian kompleks. Mahasiswa harus mengikuti penjelasan-penjelasan tambahan dalam kegiatan belajar-mengajar, dan aktif menelusur literatur yang relevan untuk mempertajam daya analisisnya terhadap Sistem Sosial Budaya.

Akhir kata, saran dan masukan sangat penulis harapkan untuk memperbaiki buku ini.

Surabaya, 16 Juni 2024.

Prof. Dr. Thomas Santoso, M.Si.
Astri Yogatama, S.Sos., M.Si

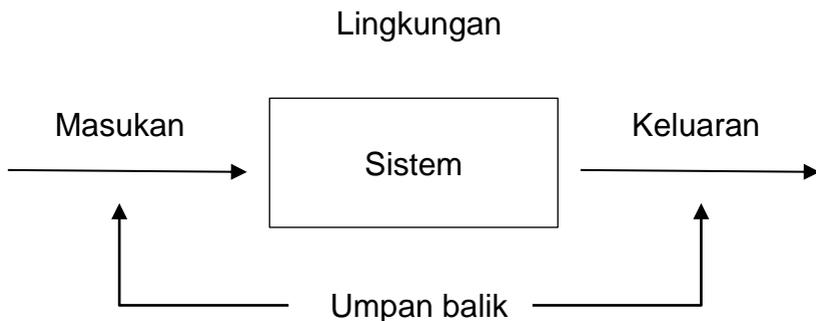
DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
1. Pengertian Sistem	1
2. Pengertian Masyarakat Dan Budaya	3
3. Saling Ketergantungan Dalam Masyarakat	9
4. Sistem Sosial Dan Persyaratannya	15
5. Pendekatan Struktural (Fungsional & Konflik)	24
6. Kemajemukan Masyarakat	47
7. Saling Ketergantungan (Interaksi Simbolik dan Pertukaran Sosial)	81
8. Sistem Sosial Budaya Indonesia	89
9. Studi Kasus : Sistem Sosial Budaya Lokal dan Kegiatan Sosial Perusahaan	91
DAFTAR REFERENSI	126
RIWAYAT HIDUP	128

1. Pengertian Sistem

Sistem berasal dari kata “*systema*” (bahasa Yunani) artinya keseluruhan yang tersusun dari bagian-bagian yang berhubungan secara teratur untuk mencapai tujuan. Ada dua makna sistem yaitu sebagai entitas (wujud benda) dan sistemik/ metode (prosedur, skema, dsb).

Sistem memiliki ciri-ciri antara lain : bertujuan, punya “batas”, terbuka, terdiri atas beberapa subsistem, suatu sinergi/ kebulatan utuh, saling berhubungan dan berkaitan secara internal dan eksternal, melakukan transformasi, memiliki mekanisme kontrol, mampu mengatur diri sendiri dan menyesuaikan diri (melalui umpan balik). Tujuan dari sistem ialah untuk memperoleh nilai tambah, dan suatu sistem bisa memiliki satu atau lebih tujuan. Untuk itu perlu ada skala prioritas sistem, termasuk kendala-kendala yang dihadapi. Sistem juga memiliki “batas”, berupa batas fisik ataupun batas secara konseptual. Sedangkan proses umpan balik dapat digambarkan sebagai berikut :



Sistem juga dapat dibedakan dalam beberapa jenis sistem seperti : fisik, biologik, sosial, alamiah, buatan manusia, mekanistik, organik, terbuka, tertutup, konseptual, konkret, kepribadian, perilaku, deterministik, dst.

Dalam pada itu, berkaitan dengan model sistem dapat dijelaskan bahwa model adalah contoh, pola, rancangan, atau abstraksi kenyataan. Keuntungan dari model sistem ialah modifikasi lebih mudah, hemat biaya dan waktu eksperimen. Model sistem berguna untuk deskripsi, analisis, maupun korelasi. Macam-macam model sistem, misalnya : skematik, sistem arus, statik, dinamik, prediktif, probabilistik, dll.

Masyarakat yang terdiri atas individu-individu, keluarga-keluarga, atau kelompok-kelompok juga merupakan sebuah sistem. Secara objektif masyarakat adalah sistem sosial, sedangkan secara subjektif, masyarakat adalah sistem interaksi. Dalam hal tertentu masyarakat dapat pula dilihat sebagai sistem pertukaran sosial.

Studi tentang sistem sosial budaya bersifat *das sollen* (apa yang seharusnya), yang tentunya berbeda dengan sistem sosial budaya yang bersifat *das sein* (kenyataannya).

2. Pengertian Masyarakat dan Budaya

Menurut Peter L. Berger, “masyarakat merupakan suatu keseluruhan kompleks hubungan manusia yang luas sifatnya”. Pengertian keseluruhan kompleks dalam definisi di atas berarti bahwa keseluruhan itu terdiri dari bagian-bagian yang membentuk suatu kesatuan. Bagian-bagian itu adalah hubungan sosial, misal hubungan ayah-anak, hubungan guru-murid, dsb. Berger juga menambahkan bahwa masyarakat menunjuk pada suatu sistem interaksi. Yang dimaksud dengan interaksi adalah tindakan yang terjadi paling kurang antara dua orang yang saling mempengaruhi perilakunya. Sistem interaksi ini dapat kita lihat dalam bentuk peraturan, kebiasaan, adat istiadat, yang diciptakan oleh manusia, dan juga mengatur perilaku manusia. Jadi dalam pandangan Berger : masyarakat diciptakan oleh manusia (individu).

Comte, bapak sosiologi, mengeluarkan suatu doktrin tentang masyarakat yaitu :

- a. Masyarakat adalah suatu kerjasama atau hubungan-hubungan yang saling memiliki ketergantungan yang terjadi tidak di atas landasan insting ataupun daya tarik alamiah, akan tetapi di atas landasan pembagian pekerjaan (*division of labour*);
- b. Masyarakat adalah laksana organisme di dalam pengertian umum;

- c. Batas-batas dari masyarakat adalah kemanusiaan sendiri.

Sengaja dikemukakan doktrin Comte, yang walaupun telah dianggap klasik tetapi tetap mempunyai pengaruh kuat terhadap perkembangan ilmu sosial dewasa ini. Misalnya mengenai “analogi organis” yang kemudian melahirkan teori struktural fungsional pada abad ke 20.

Dalam pada itu, budaya mencakup segala ciptaan dan tatanan perilaku manusia, baik yang indah (menurut anggapan kita) maupun yang tidak, baik yang serba-adab (menurut penilaian kita) maupun yang tidak. Budaya yang di ikuti secara menyeluruh oleh seluruh warga masyarakat disebut *universe*. Misal: mengucapkan terima kasih. Budaya yang di ikuti oleh suatu kelompok khusus disebut *specialty*. Misal mengisap ganja dalam acara “*fly*” dan “*orgy*”. Sedangkan budaya yang di ikuti oleh sekelompok warga masyarakat tertentu karena pilihannya yang mengatasi pilihan atas unsur budaya serupa yang lain disebut *alternative*. Misal: main golf dan tidak main tenis.

Pewarisan budaya berlangsung melalui suatu transmisi sosial yang disebut “proses belajar-mengajar”, sedangkan perawatannya berlangsung melalui proses penciptaan (termasuk improvisasi dan revisi-revisi). Proses belajar - mengajar adalah suatu proses “*exterogestation*” (penjadian/ penumbuhan anak di luar kandungan), sedangkan proses pewarisan pola perilaku instingtif adalah suatu proses “*uterogestation*”.

Menurut Koentjaraningrat (1974), kebudayaan itu mempunyai paling sedikit tiga wujud ialah :

- a. Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks dari idee-idee, gagasan, nilai-nilai, norma, peraturan, dsb. Sebagian besar dari wujud kebudayaan ini lalu bersifat “mengharuskan” atau “melarang”. Budaya lalu menjadi budaya normatif yang menghendaki agar sesuatu pola perilaku tertentu dipatuhi dan dilaksanakan (baik sebagai “*universe*” maupun “*alternative*”), atau di jauhi dan tak dilaksanakan.
- b. Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas kelakuan berpola dari manusia dalam masyarakat.
- c. Wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia.

Karena demikian luasnya, maka guna keperluan analisis konsep kebudayaan dapat dibagi menjadi beberapa unsur. Ada tujuh unsur kebudayaan yang bersifat universal, dalam arti bahwa unsur-unsur tersebut pasti bisa didapatkan di semua kebudayaan di dunia, yaitu :

1. sistem religi dan upacara keagamaan;
2. sistem dan organisasi kemasyarakatan;
3. sistem pengetahuan;
4. bahasa;
5. kesenian;
6. sistem mata pencaharian hidup;
7. sistem teknologi dan peralatan.

Berbagai nilai budaya mempengaruhi kehidupan masyarakat. Nilai-nilai ini ada yang berpengaruh langsung dan ada pula yang berpengaruh tidak langsung terhadap kehidupan masyarakat. Clyde Kluckhohn dan Florence Kluckhohn, keduanya pasangan suami-isteri ahli antropologi, dan F.L. Strotbeck seorang ahli sosiologi mengemukakan kerangka untuk menganalisis nilai-nilai budaya suatu masyarakat. Menurut kerangka Kluckhohn, semua sistem nilai budaya dalam semua kebudayaan di dunia sebenarnya mengenal lima masalah pokok dalam kehidupan manusia. Kelima masalah pokok itu adalah :

1. Masalah mengenai hakekat dari hidup manusia (Makna Hidup/MH);
2. Masalah mengenai hakekat dari karya manusia (Makna atau Fungsi Kerja/MK);
3. Masalah mengenai hakekat dan kedudukan manusia dalam ruang waktu (Makna Ruang Waktu/MW);
4. Masalah mengenai hakekat dari hubungan manusia dengan alam sekitarnya (Makna Alam/MA);
5. Masalah mengenai hakekat dari hubungan manusia dengan sesamanya (Makna Manusia/MM).

Cara berbagai kebudayaan di dunia mengkonsepsikan masalah-masalah universal tersebut di atas bisa berbeda-beda, walaupun kemungkinan untuk bervariasi itu terbatas adanya. Misal mengenai makna hidup atau makna kerja, ada kebudayaan yang

memandang bahwa hidup adalah tantangan yang harus diatasi dengan kerja keras, ada kebudayaan yang menganggap hidup untuk bersenang-senang, ada pula kebudayaan lain yang memandang bekerja keras untuk hidup santai pada suatu saat di kemudian hari. Pada masyarakat industri misalnya berkembang kebudayaan yang memandang hidup sebagai tantangan, sehingga setiap orang harus bersaing untuk memperoleh hasil yang memuaskan dirinya. Sedangkan pada masyarakat agraris menganggap hidup untuk mengabdikan dan keberhasilan usaha tergantung dari bantuan orang lain.

Mengenai masalah ruang-waktu, ada kebudayaan yang menganggap perjalanan manusia sebagai garis lurus sehingga dikenal masa lalu, masa kini dan masa yang akan datang. Ada pula kebudayaan menganggap konsep waktu bersifat siklis artinya suatu saat manusia berada pada status yang rendah, pada saat yang lain statusnya naik sehingga mencapai status yang tinggi untuk kemudian turun lagi menempati status yang rendah, demikian seterusnya. Menurut Sartono Kartodirdjo (1984), contoh konsep waktu yang bersifat siklis adalah masyarakat agraris yang tidak mengenal masa lalu dan masa yang akan datang.

Mengenai masalah keempat (makna alam), ada kebudayaan yang menganggap manusia harus menaklukkan alam, sehingga alam hanya merupakan suatu objek untuk digunakan oleh manusia. Ada pula yang menganggap manusia tunduk kepada alam sehingga manusia yang lemah akan punah. Kebanyakan masyarakat desa menganggap manusia harus selaras

dengan alam, karena alam di samping memiliki fungsi ekonomis, juga memiliki fungsi religi.

Masalah terakhir tentang hubungan manusia dengan sesamanya, ada kebudayaan yang menilai tinggi hak milik perseorangan, memandang masyarakat hanyalah sekedar jumlah individu. Ada pula kebudayaan yang memandang tinggi nilai-nilai kebersamaan (kolektif) sehingga hubungan lebih bersifat pribadi.

Dalam Ilmu Budaya dikenal istilah *cultural lag*. *Cultural lag* menggambarkan suatu keadaan masyarakat yang bersifat materiil (misalnya peralatan elektronik, komputer, robot, dsb), tetapi belum mampu untuk mengadaptasi budaya yang bersifat non materiil (misalnya perilaku yang harus dikerjakan oleh seorang ahli yang menggunakan peralatan komputer).

3. Saling Ketergantungan dalam Masyarakat

Auguste Comte (1789 - 1856) yang dikenal sebagai Bapak Sosiologi menjelaskan tentang masyarakat dan budaya dalam bentuk *social dynamics* dan *social statics*. *Social dynamics* merupakan perkembangan masyarakat yang berlangsung dalam kurun waktu yang berbeda. Sedangkan *Social statics* adalah hasil pertumbuhan yang merujuk pada waktu bersamaan,

Social dynamics memuat empat hukum, yaitu :

1. Tahap perkembangan masyarakat dimulai dari masyarakat yang bertumpu pada aspek teologis (mulai dari fetisism, politeism, sampai monotheism), bergeser ke aspek metafisik/abstrak, dan akhirnya bersandar pada aspek saintifik.
2. Ilmu pengetahuan membentuk hirarkhi, mulai dari matematika, astronomi (*celestial physics*), fisika (*molar physics*), kimia (*atomic physics*), biologi (*organic physics*) sampai sosiologi (*social physics*).
3. Dalam aktifitas praktis terdapat korelasi antara tingkat pemikiran manusia dengan tindakan praktis.
4. Bertalian dengan perasaan, ternyata sentimen kemasyarakatan mendorong sifat altruistik yang menumbuhkan perasaan sosial.

Sedangkan *social statics* mengajarkan empat doktrin, yaitu :

1. Individu sebagai cerminan masyarakat dengan sifatnya yang egoistik maupun altruistik.
2. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat dan punya daya tarik alamiah.
3. Masyarakat terbentuk atas dasar pembagian kerja, saling tergantung, ada spesialisasi, analog dengan organisme, dan batasnya adalah kemanusiaan.
4. Esensi kehidupan negara adalah kekuasaan.

Dapat disimpulkan bahwa teori Comte cenderung melihat kenyataan objektif, bersifat saintifik dengan metode induktif, menilai manusia tidak lepas dari aspek teologis dan metafisik, serta masyarakat berada dalam keadaan yang teratur dan seimbang. Persoalannya bagaimana kalau situasi tidak teratur, keadaan perang misalnya.

Dalam pada itu Herbert Spencer (1820 - 1930) merintis konsep evolusi sosial, biologi, dan etika. Spencer menjelaskan sistem evolusi sosial-budaya berikut ini :

1. Ketidakstabilan yang homogen. Peristiwa yang tidak sama menyebabkan homogenitas berubah, membesar dan semakin luntur.
2. Berkembangnya kekuatan lain yang berhadapan dengan keseimbangan.
3. Adanya kecenderungan bagian-bagian yang berbeda untuk membentuk segregasi.
4. Batas final proses evolusi sosial adalah keseimbangan akhir.

Lebih lanjut Spencer menyatakan prinsip sistem sosial budaya sebagai berikut :

1. Masyarakat adalah organisme (atau bahkan super organisme).
2. Ada keseimbangan antar kelompok dalam masyarakat.
3. Upaya untuk melahirkan eksistensi akan melahirkan konflik.
4. Perjuangan menimbulkan rasa takut (mati) yang dikontrol oleh agama.
5. Adanya kontrol politik dan agama, maka kebiasaan konflik menjadi benih militerisme.
6. Militerisme memaksa integrasi sosial dalam bentuk “kedamaian”.
7. Masyarakat yang telah damai bersifat plastis, artinya bisa pindah dari yang satu ke yang lain tanpa merusak kohesi sosial.
8. Militerisme benih dari industrialisme (kerja keras), dimana masyarakat industri berhadapan dengan masyarakat militer.
9. Semakin lambat nilai integrasi, semakin lengkap evolusi.
10. Individu dan masyarakat saling mempengaruhi.
11. Analogi biologis

Manusia	Masyarakat
Otak	Sistem peraturan (pemerintah & militer)
Peredaran darah	Sistem distribusi (perdagangan)
Syaraf	Sistem komunikasi
Nutrisi	Sistem penopangan (ekonomi)

Kesimpulan :

1. Masyarakat seperti organisme biologis yang mengalami evolusi, pertumbuhan, perkembangan, kompleksitas, diferensiasi, dst.
2. Semakin banyak komponen yang membentuk masyarakat sebagai suatu sistem, semakin mudah sistem terpecah dalam bagian yang bertentangan.
3. Semakin besar suatu sistem, semakin besar kemungkinan suatu bagian (atau beberapa bagian) yang penting namun terabaikan.

Emile Durkheim (1858) mengemukakan beberapa teori tentang masyarakat sebagai berikut :

1. Masyarakat adalah fakta sosial yaitu gejala sosial yang dapat diobservasi.
2. Ada dua macam kesadaran yaitu kesadaran individu dan kesadaran kolektif. Kesadaran individu diikat oleh kontrak sosial, sedangkan kesadaran kolektif diatur oleh aturan di luar kontrak. Kesadaran kolektif memiliki sifat eksterior (moral, agama, nilai), dan *constraint* (paksaan).
3. Bertalian dengan integrasi sosial dipahami bahwa kepentingan yang berbeda mendorong proses

integrasi. Semakin otonom suatu bagian masyarakat, maka semakin saling tergantung bagian tersebut dengan bagian lainnya.

4. Sifat individualistik dapat diubah ke bentuk solidaritas. Ada dua macam solidaritas yaitu solidaritas mekanis dan solidaritas organis. Solidaritas mekanis ditandai dengan aturan represif, masyarakatnya homogen, dan percaya pada banyak Tuhan. Sedangkan solidaritas organis ditandai oleh aturan restitutif, masyarakatnya heterogen, dan percaya pada satu Tuhan. Pergeseran solidaritas mekanis ke solidaritas organis disebabkan pembagian kerja di dalam masyarakat.
5. Agama berasal dari masyarakat itu sendiri, yang berkaitan dengan sesuatu yang sakral dan profan. Hal ini terlihat mulai dari bentuk kepercayaan totemisme sampai monoteisme. Manusia tidak mempelajari hakekat agama, tetapi hanya interpretasi utusan agama. Misal Katolik lewat Paus, Protestan lewat Calvin, dst. Tuhan adalah lambang masyarakat itu sendiri, yang berfungsi untuk mempersatukan atau memecah belah masyarakat. Kecenderungan agama untuk memecah belah masyarakat, karena agama bersifat absolut dan menumbuhkan fanatisme sempit, agama selalu melakukan ekspansi, dan ada penetrasi agama terhadap budaya, demikian sebaliknya. Kesadaran kolektif masyarakat akan menjadi representasi kolektif dalam bentuk lambang, totem, dsb. Ada dua hal pokok dalam agama yaitu kepercayaan (pikiran) dan ritus (tindakan). Kedua hal ini tidak dapat dipisahkan. Sebagai tokoh

fungsionalisme awal, Durkheim melihat agama dalam fungsinya yang integratif. Kelemahan dari teori Durkheim ialah terlalu saintifik, dan terlalu mengagungkan kesadaran kelompok.

4. Sistem Sosial dan Persyaratannya

Talcott Prasons adalah tokoh fungsionalisme imperatif yang lebih menekankan konsep (ide) daripada proposisi. Pada tahap awal Parsons lebih memperhatikan tindakan individu, kemudian tindakan sosial, dan terakhir *grand theory*-nya yang disebut teori AGIL. *Theory of action* (untuk tindakan individu) merumuskan bahwa aksi/tindakan seseorang merupakan situasi, yang terdiri dari kondisi dan cara, untuk mencapai tujuan dan standard selektif masyarakat. *Theory of social action* merumuskan perilaku yang ditempuh masyarakat untuk mencapai tujuan yang telah disepakati bersama melalui cara tertentu yang dipengaruhi nilai, norma serta situasi dan kondisi. *General System Theory* (teori AGIL) menjelaskan hirarkhi pengendalian sibernetika sebagai berikut :

Fungsi	Sistem		Interelasi	
Latensi	Sistem	Kebudayaan	Pengendalian Informasi	
Integrasi	↓	↑	↓	↑
	Sistem	Sosial		
Goals	↓	↑	↓	↑
	Sistem	Kepribadian		
Adaptasi	↓	↑	↓	↑
	Sistem	Organisme		Kondisi energi

Talcott Parsons juga menyebutkan dikotomi-dikotomi sebagai berikut:

- ❖ Affektivitas-netralitas afektif yang menunjuk pada kadar perasaan yang proporsional dalam interaksi (apakah wujud perasaan dalam interaksi itu sedikit atau banyak);
- ❖ Perluasan-pengkhususan yang mengacu pada sampai manakah ruang lingkup kewajiban-kewajiban yang dianggap pantas dalam situasi interaksional (apakah harus seluas mungkin atau sangat terbatas);
- ❖ Universalisme-partikularisme yang menunjuk pada masalah apakah evaluasi atau penilaian para pihak dalam interaksi harus berpedoman pada patokan umum atau subyektif;
- ❖ Prestasi-askripsi yang berkaitan dengan masalah bagaimana menilai aktor, yakni dari sudut kemampuannya atau berdasarkan faktor-faktor kelahiran;
- ❖ Pribadi-kolektivitas, artinya apakah aksi harus berorientasi pada kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok.

Tipologi yang disebut pertama merujuk pada tipe masyarakat tradisional, sedangkan yang kedua adalah tipe masyarakat modern.

Jenis realitas sosial yang dikaji lebih dominan pada dunia empirik, misalnya tindakan individu dan tindakan sosial yang dapat diamati, serta teori AGIL yang menekankan sistem dan kondisi energi. Realitas sosial yang otonom bisa individu (*theory of action*), bisa struktur

(teori AGIL), dan bisa pula agency (*theory of social action* dan *voluntaristic theory of action*).

Penjelasan yang diberikan bersifat fungsional, misalnya dalam *general system theory* (teori AGIL). Teori AGIL yang merupakan singkatan dari *adaptation* (adaptasi), *goal attainment* (pencapaian tujuan), *integration* (integrasi) dan *latency pattern maintenance* (latensi). Adaptasi berkaitan dengan masalah mengamankan fasilitas lingkungan yang cukup dan membagikan fasilitas tersebut dalam sistem. Pencapaian tujuan mengacu pada masalah prioritas tujuan sistem dan menggerakkan sumber-sumber daya sistem untuk mencapainya. Integrasi menunjuk pada masalah koordinasi dan pemeliharaan hubungan antara unit-unit suatu sistem. Latensi mencakup dua masalah yang saling berkaitan, yakni pemeliharaan pola dan pengendalian ketegangan. Pemeliharaan pola berkaitan dengan masalah bagaimana menjamin agar para aktor dalam suatu sistem sosial mempunyai karakteristik yang memadai (misalnya motif, dan kebutuhan ketrampilan memainkan peran). Pengendalian ketegangan menyangkut masalah ketegangan internal dan tekanan yang dialami oleh para aktor dalam sistem sosial.

Persyaratan-persyaratan tersebut sebenarnya secara implisit sudah ada dalam buku *The Social System*, akan tetapi dibahas sebagai bagian dari integrasi yang merupakan masalah utama. Akan tetapi dalam pembahasan mengenai integrasi di dalam dan antara sistem-sistem aksi dalam buku tersebut masalah-masalah untuk mengamankan fasilitas, alokasi dan pencapaian

tujuan, sosialisasi serta pengendalian sosial (atau latensi) sangat menonjol. Pengembangan keempat persyaratan fungsional bukan merupakan suatu perbedaan yang ekstrim dengan pembahasan sebelumnya.

Parsons memandang setiap sistem dan subsistem mempunyai tugas untuk menanggulangi masalah-masalah adaptasi, pencapaian tujuan, integrasi dan latensi, hal mana dapat ditelaah pada diagram sebagai berikut :

**DIAGRAM I
AGIL**

Adaptasi
Goal

A	G	G	G
L	I		
L		I	
L			I

Latensi
Integrasi

Sebagaimana dapat dilihat pada diagram tersebut di atas, maka setiap sistem atau subsistem dapat diperinci dalam empat sektor. Sektor-sektor itu menunjukkan adanya suatu masalah untuk bertahan, yang mungkin adalah A, G, I, atau L. Dengan demikian, setiap masyarakat harus dapat menanggulangi masalah-masalah A, G, I, dan L sebagaimana halnya dengan setiap subsistem seperti tempat pada sektor adaptasi. Oleh karena itu sebagaimana digambarkan dalam sektor adaptasi, maka semua sistem pada pelbagai taraf, baik yang luas maupun yang sempit, harus menanggulangi keempat persyaratan sistem yang terdiri dari A, G, I, dan L.

Yang secara analitis kritis sangat penting dari kerangka tersebut adalah hubungan timbal balik antara sistem-sistem maupun subsistem. Hal ini disebabkan, karena sulit untuk memahami berfungsinya suatu sistem sosial tanpa meneliti hubungan timbal balik antara adaptasi, pencapaian tujuan, integrasi dan latensi, karena sektor-sektor itu dipengaruhi oleh hubungan timbal balik antara subsistem-subsistem yang ada dan sistem-sistem lainnya dalam lingkungan. Selanjutnya suatu subsistem tak akan dapat dipahami apabila tanpa meneliti hubungan timbal balik internal antara sektor-sektor adaptasi, pencapaian tujuan, integrasi dan latensi, karena hubungan-hubungan itu dipengaruhi oleh interelasi antara subsistem-subsistem lainnya serta sistem inklusif yang mencakupnya. Dengan adanya perkembangan itu, maka kerangka yang dikembangkan Parsons sudah merupakan peta operasional.

Posisi teori Parsons dalam Paradigma Terpadu George Ritzer adalah beragam dapat termasuk makro-subjektif (teori AGIL), makro objektif (*theory of social action*) atau mikro-objektif (*theory of action*).

Konteks sosial melatarbelakangi jalan pikiran Parsons adalah :

- a. Pada abad ke 19, ajaran-ajaran utilitarian ekonomi klasik Inggris semakin banyak dipermasalahkan oleh pemikir sosial di Eropah. Manusia tidak lagi dipandang sebagai makhluk rasional dalam suatu pasaran yang bebas, terbuka, tidak teratur dan kompetitif. Masyarakat tidak dapat menerima asumsi bahwa ketertiban sosial akan muncul dengan sendirinya kalau persaingan pribadi secara bebas dibiarkan;
- b. Munculnya kerusuhan-kerusuhan akibat revolusi Perancis, industrialisasi dan urbanisasi;
- c. Adanya beberapa pemikir ilmu sosial yang memiliki latar belakang biologi berusaha untuk menciptakan tertib masyarakat berdasarkan analogi organik.

Teori Parsons pada dasarnya merupakan suatu sintesis dari titik pandangan positivisme dan idealisme yang saling bertentangan. Keempat tokoh yang dianalisis yakni Alfred Marshall, Vilfredo Pareto dan Emile Durkheim bertitik tolak dari posisi positivis, sedangkan Max Weber bertolak dari konteks idealisme Jerman pada umumnya.

Talcott Parson lahir tahun 1902. Ayahnya adalah seorang pendeta. Belajar biologi dan kedokteran di Kolose Amherst, belajar ilmu sosial dan ekonomi di *London*

School of Economics - Inggris, belajar sosiologi di Heidelberg - Jerman. Parsons mengajar di Departemen Sosiologi Universitas Harvard di Amerika Serikat. Parsons adalah orang yang memperkenalkan pemikiran sosiologi Eropah ke Amerika Serikat.

Asumsi yang mendasari teorinya adalah :

- a. Manusia adalah makhluk sosial (sistem sosial) yang diatur oleh sistem budaya (*latency pattern maintenance*)
- b. Masyarakat sebagai sistem sosial mengatur sistem kepribadian dan sistem organisme (individu).

Fenomena sosial yang dijelaskan adalah *order*, karena masyarakat dipandang sebagai sistem yang terbentuk di atas landasan *self regulated* (kemampuan untuk memenuhi kebutuhan sendiri) ke arah terciptanya *equilibrium* (keseimbangan) dan homeostatis (kemampuan).

Konsep-konsep penting :

- a. *Order* (ketertiban) merupakan suatu tatanan kehidupan yang terbentuk tanpa menghapuskan keadaan alamiah manusia atau memerangi motif pribadi manusia, namun merupakan suatu proses untuk mencapai keseimbangan dan keselarasan.
- b. Sistem adalah hubungan timbal balik antara unsur-unsur yang berada dalam keseimbangan.
- c. Fungsi adalah peran yang dijalankan dalam kehidupan sosial secara keseluruhan dan memberikan sumbangan untuk kelangsungan masyarakat.
- d. Keseimbangan (*equilibrium*) adalah situasi dinamis

dalam masyarakat yang cenderung untuk mempertahankan kemantapan.

Proposisi :

Masyarakat sebagai sistem sosial yang terdiri dari berbagai unsur (sistem kepribadian dan sistem organisme) yang berhubungan timbal-balik secara fungsional untuk mencapai keseimbangan (*equilibrium*) dalam kerangka tertib (*order*) masyarakat.

Unit analisis yang digunakan untuk mengkaji realitas sosial ialah :

- a. *society*
- b. institusi
- c. regional (sistem sosial)

paradigma metodologi yang digunakan Post Positivistik.

Bias (keberpihakan) yang dikandung teori fungsional Parsons :

- a. Nilai (*good society* yang dipreskripsi) hanya melihat masyarakat dari nilai harmoni, namun melupakan nilai konflik. Sebenarnya konflik adalah gejala yang serba hadir, karena selalu ada di dalam masyarakat.
- b. *Power* (melegitimasi atau mempertanyakan kekuasaan macam apa) sangat disenangi oleh penguasa, karena cenderung membenarkan kekuasaan yang ada.
- c. Kepentingan (mendukung atau menentang perubahan macam apa) cenderung membenarkan situasi yang

ada seperti kejahatan, kemiskinan, pelacuran dan sebagainya, karena segala sesuatu yang ada berarti memiliki fungsi.

Status ilmu sosial dalam kaitan dengan logika ilmu alam: sistem sosial (masyarakat) mengikuti kaidah hukum alam yang *self regulated* ke arah terciptanya *equilibrium* dan *homeostatis*.

5. Pendekatan Struktural (Fungsional & Konflik)

Robert K. Merton merupakan tokoh fungsionalisme struktural yang mengembangkan *middle range theory* dengan berdasarkan data empirik. Teori yang dikembangkan ialah bentuk penyesuaian yang meliputi konformitas (untuk mencapai tujuan yang disepakati masyarakat digunakan cara yang disepakati masyarakat); inovasi (untuk mencapai tujuan yang disepakati masyarakat digunakan cara yang baru) *ritualisme* (terlalu mementingkan cara, sehingga tujuan terlupakan); *retreatisme* (menolak cara dan tujuan yang telah disepakati masyarakat), dan *rebellion* (menolak cara dan tujuan yang lama, kemudian mengajukan cara dan tujuan yang baru). Selain itu Merton juga memperkenalkan teori *manifest* (yang nampak/kelihatan) dan *laten* (tersembunyi/belum nampak) dalam setiap kegiatan masyarakat.

Jenis realitas sosial yang dikaji ialah dunia empirik dalam bentuk fakta-fakta sosial. Realitas sosial yang otonom ialah struktur (determinisme), bahkan Merton dikenal sebagai tokoh fungsionalisme struktural. Pendapat Merton yang menekankan struktur diantaranya :

- Semua struktur sosial yang ada memenuhi fungsi sosial tertentu yang tidak mungkin ditinggalkan;
- Struktur cenderung mengagungkan keadaan yang ada;
- Memandang struktur sosial yang ada sebagai sesuatu

yang mutlak di samping ada pula aspek disfungsionalnya bagi individu, kelompok, maupun masyarakat;

- Mengakui bahwa struktur sosial senantiasa berubah;
- Terjadinya akumulasi sifat-sifat disfungsional bukan berarti bahwa masyarakat itu akan hancur, tetapi terjadi suatu sistem sosial baru;
- Analisis fungsional terhadap struktur sosial sama sekali tidak harus terikat pada suatu ideologi tertentu.

Penjelasan yang diberikan ialah fungsional, baik *latent* maupun *manifest*, baik fungsional maupun disfungsional. Salah satu hasil pekerjaan menonjol Merton adalah mengadakan modifikasi terhadap pendekatan fungsional. Menurut Merton, pendekatan fungsional merupakan salah satu kemungkinan untuk mempelajari perilaku sosial manusia. Pendekatan fungsional yang semula dogmatis dan eksklusif dilengkapi dengan pelbagai kualifikasi, sehingga agak berkurang kekakuan dan keketatannya. Salah satu kualifikasi itu adalah pembedaan antara fungsi dengan disfungsi, yang memungkinkan telaah terhadap perubahan sosial yang bersumber pada masyarakat itu sendiri. Demikian juga halnya dengan pembedaan antara fungsi manifes dengan fungsi laten, yang memungkinkan penelitian terhadap lembaga-lembaga sosial aktual dan interpretasi tugas-tugasnya menurut anggota masyarakat, oleh karena lembaga sosial mempunyai aneka ragam fungsi.

Posisi teori sosial Merton termasuk makro-objektif (bicara struktur sosial/masyarakat) dalam Paradigma Terpadu George Ritzer.

Konteks sosial yang melahirkan teori sosial Merton adalah pertumbuhan teori sosial yang bersifat tambal sulam serta kurang mendalam sifatnya. Analisa fungsional misalnya sangat tergantung pada kaitan antara teori, metode dan data. Dan ketiga faktor tersebut, yang paling lemah adalah masalah metode. Pendekatan fungsional dalam sosiologi yang berkembang saat itu ditandai dengan kerancuan mengenai terminologi dan pengertian, karena pengertian yang terlalu bervariasi. Apalagi masyarakat industri saat itu tengah berkembang pesat, sehingga suatu pengertian acapkali dan berulang kali mengalami modifikasi yang berbeda dengan pengertian awalnya.

Pemikiran filsafat yang mempengaruhi teori sosial Merton adalah positivisme (memadukan empirisme dan rasionalisme, namun lebih condong ke empirisme) dan filsafat sosial Eropah (Emile Durkheim, George Simmel, P.A. Sorokin).

Robert K. Merton adalah murid pertama Talcott Parsons di Harvard University. Setelah lulus, Merton dan temannya Lazarsfeld bekerja di Universitas Columbia. Di tempat inilah Merton “mbalelo” terhadap pemikiran gurunya (Parsons) dan memperkenalkan *middle range theory* yang lebih empirik. Karya Merton mencerminkan suatu kepekaan yang lebih besar terhadap hubungan dinamis antara penelitian empirik dan proses berteori.

Pemikiran dan metode inilah yang menghasilkan teori-teori taraf menengah.

Asumsi (tentang manusia dan masyarakat) yang mendasari teori Merton:

- a. Manusia adalah makhluk sosial yang aktivitasnya melembaga dan bersifat fungsional bagi seluruh sistem sosial dan kebudayaan;
- b. Masyarakat merupakan struktur sosial yang terdiri atas bagian-bagian (individu dan entitas) yang berhubungan secara fungsional (atau disfungsional) dalam suatu ketertiban yang harmonis.

Fenomena sosial yang dipertanyakan dan dijelaskan bertalian dengan tiga postulat yaitu :

- a. Perlu pembuktian penelitian empiris terhadap postulat pertama (aktivitas sosial yang melembaga atau unsur-unsur kebudayaan bersifat fungsional bagi seluruh sistem sosial atau kebudayaan). Juga diperlukan spesifikasi terhadap unsur-unsur sosial yang mempunyai fungsi, serta kemungkinan-kemungkinan bahwa unsur-unsur sosial dan budaya tertentu bersifat disfungsional dalam situasi tertentu;
- b. Postulat kedua (semua unsur sosial dan kebudayaan memenuhi fungsi sosiologis ternyata secara empiris tidak semua unsur sosial dan budaya yang bertahan, mempunyai sifat fungsional);

- c. Postulat ketiga yang berasumsi bahwa fungsi tertentu merupakan prasyarat adanya masyarakat, mungkin mengakibatkan terjadinya alternatif lain. Alternatif lain tersebut terwujud dari kemungkinan adanya unsur-unsur yang mempunyai fungsi substitutif.

Konsep-konsep penting:

- a. Konsep Disposisi Subjektif (motif dan tujuan)
- b. Konsep Konsekuensi Objektif (fungsi dan disfungsi)
- c. Konsep Fungsi (laten dan manifes)
- d. Konsep Peryaratan Fungsional (kebutuhan-kebutuhan prasyarat)
- e. Konsep Substitusi Fungsional (alternatif fungsional)
- f. Konsep Konteks Struktural (kendala-kendala struktural)

Proposisi yang ditawarkan :

- Bagi Merton, pendekatan fungsional bukanlah suatu teori komprehensif dan terpadu, melainkan suatu strategi untuk analisis. Persoalan penting bagi suatu teori adalah apakah dia dapat digunakan untuk menghasilkan hipotesis-hipotesis empiris.
- Motif atau orientasi subjektif menghasilkan tindakan yang membawa konsekuensi-konsekuensi untuk suatu sistem sosial, termasuk di dalamnya ialah fungsi manifes dan fungsi laten.
- Konsep disfungsi sangat berguna dalam mengembangkan suatu pendekatan fungsional terhadap masalah sosial dan perubahan sosial.

- Anomi dan perilaku menyimpang merupakan hasil dari ketegangan- ketegangan tertentu dalam struktur sosial.

Unit yang digunakan untuk mengkaji realitas sosial :

- a. *society*
- b. institusi
- c. regional (sistem sosial)

Paradigma metodologi yang digunakan ialah Positivistik (perpaduan antara empirisme dan rasionalisme dengan lebih condong pada empirisme).

Bias (keberpihakan) yang dikandung teori sosial tersebut: Nilai (*good society* yang di preskripsi) memandang masyarakat secara sistemik sehingga memperhitungkan dan berhati-hati menghadapi setiap perubahan. Meskipun struktur sosial mengalami disfungsi, namun akhirnya akan mencapai keseimbangan baru dalam sistem tersebut. Oleh karena itu cenderung melegitimasi kekuasaan yang ada dan mendukung terciptanya konsensus dan mengabaikan konflik.

Status ilmu sosial dalam kaitan dengan logika ilmu alam: melihat secara kritis dan pragmatis tentang ketertiban harmonis lingkungan alam semesta adalah di bawah bimbingan Yang Maha Kuasa, yang mengembangkan kesejahteraan manusia melalui proses pengembangan potensi diri. Dengan jalan memperhatikan disfungsi dan fungsi, maka analisis tadi tidak hanya dapat

mengidentifikasi dasar-dasar stabilitas sosial, akan tetapi juga sumber-sumber potensial bagi terjadinya perubahan.

Jeffrey Alexander merupakan tokoh neofungsionalisme yang mengembangkan analogi organik dan sistemik secara sangat empirik. Teori yang dikembangkan hampir sama dengan pendahulunya, namun dengan sifat yang sangat empirik. J. Alexander mulai memperhatikan adanya pertentangan di dalam suatu sistem.

Jenis realitas sosial yang dikaji ialah dunia empirik dalam bentuk fakta sosial. Realitas sosial yang otonom ialah struktur (determinisme) yang secara esensial tercermin pada prinsip pokok neofungsionalisme :

- Masyarakat merupakan sistem yang kompleks yang terdiri atas bagian-bagian yang saling berhubungan dan saling tergantung, dan setiap bagian tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap bagian-bagian lainnya.
- Setiap bagian dari sebuah masyarakat eksis karena bagian tersebut memiliki fungsi penting dalam memelihara eksistensi dan stabilitas masyarakat secara keseluruhan, karena itu eksistensi satu bagian tertentu dari masyarakat dapat diterangkan apabila fungsinya bagi masyarakat sebagai keseluruhan dapat diidentifikasi;
- Semua masyarakat mempunyai mekanisme untuk mengintegrasikan dirinya, yaitu mekanisme yang dapat merekatkannya menjadi satu; salah satu bagian penting dari mekanisme ini adalah komitmen para

anggota masyarakat kepada serangkaian kepercayaan dan nilai yang sama;

- Masyarakat cenderung mengarah kepada suatu keadaan equilibrium atau homeostatis, dan gangguan pada salah satu bagiannya cenderung menimbulkan penyesuaian pada bagian lain agar tercapai harmoni atau stabilitas;
- Perubahan sosial merupakan kejadian yang tidak biasa dalam masyarakat, tetapi bila itu terjadi juga, maka perubahan itu pada umumnya akan membawa kepada konsekuensi-konsekuensi yang menguntungkan masyarakat secara keseluruhan.

Penjelasan yang diberikan ialah fungsionalisme yaitu masyarakat dipandang sebagai suatu sistem yang terdiri atas struktur-struktur yang berhubungan secara fungsional atas dasar interaksi, interelasi, dan interdependensi.

Posisi teori J. Alexander dalam Paradigma Terpadu George Ritzer adalah makro objektif, karena pembahasan bertalian dengan masyarakat dalam bentuk fakta sosial.

Konteks sosial yang melahirkan teori sosial J. Alexander ialah :

Teori struktural fungsional muncul menjadi bagian dari analisis sosiologis pada tahun 1940-an. Fungsionalisme mencapai masa kejayaannya pada tahun 1950-an. Pada saat tersebut fungsionalisme menjadi strategi teoritis standard yang diikuti mayoritas sosiolog, dan hanya sebagian kecil yang menentanginya. Namun mulai tahun 1960-an

dominasi teori fungsionalisme mendapat tantangan keras dan adekuasi teoritisnya semakin dipertanyakan. Strategi teoritis ini segera memasuki masa kerontokannya. Namun meskipun mayoritas sosiolog saat itu nampak tidak menganjurkan pendekatan fungsionalis dalam mengkaji kehidupan sosial, fungsionalisme masih tetap didukung secara serius oleh kelompok minoritas yang signifikan secara sosiologis. Dalam kenyataannya, sejak awal tahun 1980-an muncul J. Alexander seorang fungsionalis baru (neo fungsionalisme) yang terkemuka.

Pemikiran filsafat yang mempengaruhi teori J. Alexander adalah perdebatan klasik antara empirisme dan rasionalisme dalam bentuk materialisme dan idealisme. Beberapa pemikir sosial seperti Durkheim, Weber, dan Marx mewarnai pemikiran J. Alexander.

Latar belakang pribadi J. Alexander yang dikenal banyak terlibat dalam gerakan protes mahasiswa di Harvard maupun Berkeley. Karya Alexander antara lain *Theoretical Logic in Sociology, Twenty Lectures: Sociological Theory Since World War II*.

Asumsi (tentang manusia dan masyarakat) yang mendasari teori:

- a. Manusia sebagai makhluk sosial merupakan suatu kumpulan orang yang berinteraksi dengan cara-cara tertentu untuk memenuhi berbagai kebutuhan dan hasrat mereka.
- b. Masyarakat merupakan sistem yang kompleks yang

terdiri atas bagian-bagian yang saling berhubungan dan saling tergantung, dan setiap bagian tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap bagian-bagian lainnya.

Fenomena sosial yang dipertanyakan dan dijelaskan ialah :

- Fungsionalis cenderung terlalu menekankan kepada tingkat di mana masyarakat manusia bersifat harmonis, stabil dan merupakan sistem yang terintegrasi dengan baik;
- Karena penekanan yang berlebihan kepada harmoni dan stabilitas, fungsionalis cenderung mengabaikan atau meremehkan tingkat di mana konflik sosial merupakan ciri dasar dari kebanyakan masyarakat;
- Dengan terlalu melebih-lebihkan harmoni sosial dan meremehkan konflik sosial, fungsionalis cenderung mengarah kepada bias konservatif dalam mengkaji kehidupan sosial; yakni mereka cenderung mendukung perlunya mempertahankan segala pengaturan yang ada dalam sebuah masyarakat;
- Dalam mengkaji sebuah masyarakat mereka pada umumnya hanya mengkaji satu titik masa tertentu (masa kini), sehingga menerapkan pendekatan yang jelas-jelas a-historis dalam mengkaji kehidupan sosial;
- Karena fungsionalis mengabaikan dimensi historis dalam mengkaji kehidupan sosial mereka sangat sulit menerangkan perubahan sosial dalam konteks perspektif materialis dan lebih-lebih dalam perspektif konflik.

Asumsi-asumsi yang mendasari teori konflik ialah :

- a. Walaupun hubungan-hubungan sosial memperlihatkan adanya ciri-ciri suatu sistem, akan tetapi dalam hubungan-hubungan itu terdapat benih-benih konflik kepentingan;
- b. Fakta ini menunjukkan bahwa suatu sistem memungkinkan menimbulkan konflik;
- c. Dengan demikian, maka konflik merupakan suatu gejala yang ada dalam setiap sistem sosial;
- d. Konflik demikian cenderung terwujud dalam bentuk bipolar dari kepentingan-kepentingan;
- e. Konflik sangat mungkin terjadi terhadap distribusi sumber-sumber daya yang terbatas dan kekuasaan;
- f. Konflik merupakan suatu sumber terjadinya perubahan pada sistem sosial.

Karl Marx dengan materialisme dialektika menegaskan bahwa materi menentukan ide. Materialisme dialektika berasal dari materialisme filsafat (naturalisme) terutama pengaruh Feuerbach, tetapi jalan pikirannya yang dialektik diambil dari Hegel. Hanya pikiran Hegel diputarbaliknya. Hegel mengambil cita sebagai pangkal pikiran, Marx sebaliknya mulai dari kenyataan kebendaan yang dipindahkan dan dibalikkan dalam otak manusia.

Jenis realitas sosial yang dikaji ialah dunia empirik dan fakta sosial dalam bentuk sistem sosial (hubungan produksi serta alat dan sarana produksi, juga super struktur) dan formasi sosial.

- Sistem sosial mengandung dua komponen yaitu super struktur dan sub struktur. Ada 2 elemen sub struktur

yaitu hubungan produksi serta sarana dan alat produksi. Jadi sub struktur menjadi determinan sistem sosial, dan super struktur tergantung pada sub struktur.

- Hubungan produksi ditentukan oleh siapa yang menguasai elemen produksi (kapitalis-majikan, feodal-patron, sosialis-kolektif, komunal-bergiliran); siapa yang menentukan cara memproduksi (kapitalis-majikan, komunal-bersama-sama, feodal-kawula memberi upeti pada patron); bagaimana cara menarik nilai lebih (subsistem-habis hari itu juga, feodal-loyalitas, kapitalis-mekanisme pasar).
- Sarana produksi terdiri dari bahan-bahan yang bersifat material (bahan mentah, lingkungan, tanah, alat-alat pabrik), sedangkan alat produksi terdiri dari bahan-bahan yang bersifat non material (motivasi, pengetahuan, ketrampilan). Kunci dari sarana dan alat produksi ialah menguasai sumber alam, sedangkan cirinya bersifat dinamis (diam akan tertinggal dan akhirnya punah).
- *Social Formation*: Dalam setiap masa tidak selalu terdapat satu sistem nilai atau satu sistem ekonomi. Dalam sistem ekonomi selalu terdapat lebih dari satu model (campuran feodal, kapitalis, komunal, dsb). Kita harus menentukan sistem mana yang paling dominan. Secara ekstrim dapat dikatakan sistem sosial dan sistem ekonomi saat ini ialah sistem kapitalis karena merupakan sistem yang dominan.

Realitas sosial yang otonom adalah struktur (determinisme). Karl Marx dikenal dengan determinisme ekonomi di mana kekuatan produksi (sub struktur) menentukan super struktur.

Super struktur :	Sistem nilai : ideologi, agama, seni-budaya
	Pranata : organisasi yang menguatkan ideologi seperti negara, hukum, pendidikan.
Sub struktur :	Hubungan produksi
	Sarana & alat produksi

Penjelasan yang diberikan bersifat historis. Dari interpretasi sejarah ekonomi disimpulkan bahwa klas adalah motor dari segala perubahan serta kemajuan. Sejarah kehidupan manusia tidak lebih dari pertentangan antar klas/golongan (bebas merdeka X budak; penindas X tertindas; kaya X miskin; penguasa X yang dikuasai). Konflik klas bersifat abadi dalam arti pertikaian selalu berganti dan berbeda dari zaman ke zaman. Perbedaan posisi dalam sistem produksi akan menimbulkan pertentangan klas.

Posisi teori sosial Karl Marx dalam Paradigma Terpadu George Ritzer ialah Makro Objektif, karena menekankan fakta sosial dalam bentuk sistem sosial (masyarakat).

Konteks sosial yang melahirkan teori sosial Marx ialah ketika Karl Marx yang semula belajar di Bonn dan kemudian di Berlin. Di Berlin ia terpicat oleh filsafat Hegel. Semula ia bekerja sebagai wartawan, kemudian pindah ke

Paris, tempat ia bertemu dengan Friedrich Engels (1820-1895). Karena pertolongan Engelslah Marx dapat meneruskan karya ilmiahnya. Ketika ia diusir dari Perancis ia pindah ke Brussel. Pada waktu meletus revolusi di Jerman pada tahun 1848 pindahlah ia ke Koln. Setelah ia diusir dari Jerman pindahlah ia lagi ke Paris dan akhirnya berdiam di London hingga matinya (1883). Pekerjaannya sebagai wartawan menyebabkan dia berkecimpung dalam politik yang praktis. Hal ini menjadikan dia dapat secara langsung berhubungan dengan kenyataan kemasyarakatan, ia mulai belajar ekonomi negara secara mendalam. Karya pokok Marx adalah *Das Kapital*, atau "Kapital", yang bagian pertamanya ditulis pada tahun 1867. Kedua bagian lainnya tidak di selesaikan, karena kesibukan-kesibukan organisasi dan karena kesehatannya. Kedua bagian ini kemudian diterbitkan oleh Engels (1885 dan 1894).

Pemikiran filsafat yang mempengaruhi teori sosial Marx ialah materialisme/naturalisme, dialektika, dan utopis. Pangkal pemikiran Marx adalah ajaran Hegel. Pada waktu yang lebih kemudian kepada ajaran Hegel itu digabungkan juga filsafat Feuerbach, teori revolusioner Perancis, yakni terutama gagasan-gagasan para sosialis utopis, dan juga pandangan ekonomi negara Inggris yang klasik.

Nisbahnya dengan Hegel dapat dirumuskan demikian: Marx mengambil alih dari Hegel metode dialektikanya dan gagasan, bahwa ada ikatan yang erat antara filsafat, sejarah dan masyarakat.

Dialektika Hegel dipakai sebagai metode, ditambah dengan sebuah isi yang bertentangan sekali dengan isi ajaran Hegel. Dialektika itu dipandang sebagai asas revolusioner, sehingga dunia bukan dipandang sebagai suatu himpunan yang terdiri hal-hal yang telah selesai jadi, melainkan sebagai suatu himpunan yang terdiri dari proses-proses. Tiada sesuatupun yang telah tetap atau telah bersifat mutlak. Satu-satunya yang ada adalah proses menjadi dan proses hancur yang tiada hentinya. Proses ini bukan terjadi secara lurus, melainkan secara spiral, dengan mengalami tahap-tahap yang telah dilalui, suatu perkembangan yang melompat-lompat, yang disertai dengan perkembangan revolusioner beserta bencana-bencananya. Jadi proses ini adalah suatu proses dialektis, yang diisi bukan dengan pandangan dunia yang dialektis, melainkan dengan pandangan dunia yang materialistis.

Marx setuju dengan Feuerbach yang mengajarkan, bahwa manusia harus dipandang sebagai *Gattung*, sebagai makhluk alamiah. Oleh karena itu segala pengertian spekulatif seperti yang dikemukakan Hegel harus ditolak, sebab hanya apa yang nyata yang benar. Sekalipun demikian, menurut Marx, Feuerbach masih tetap tidak berpikir secara konkrit, sebab Feuerbach belum memperhatikan kedudukan manusia yang khas. Sebagai *Gattung*, sebagai makhluk alamiah, manusia harus dibedakan dengan binatang, sebab manusia adalah makhluk yang bermasyarakat, makhluk yang dilibatkan kedalam proses produksi, dilibatkan ke dalam hubungan kerja dan hubungan milik. Sesuai dengan pandangan

Feuerbach Marx berpendapat bahwa agama adalah hasil proyeksi keinginan manusia, akan tetapi Marx berpikir lebih lanjut, dan bertanya mengapa timbul keinginan-keinginan tertentu di tengah-tengah kelompok manusia tertentu itu? Jawabannya didapatkan di dalam hubungan-hubungan kemasyarakatan. Perasaan-perasaan dan gagasan keagamaan adalah hasil suatu bentuk masyarakat tertentu. Jikalau kita membicarakan manusia tidak boleh kita membicarakannya sebagai tokoh yang abstrak, yang berada di luar dunia ini. Manusia berarti dunia manusia, yaitu negara, masyarakat. Negara, masyarakat, inilah yang menghasilkan agama.

Keberatan-keberatan Marx terhadap para materialis Perancis ialah, bahwa mereka tidak dialektis, melainkan statis, sehingga ajaran mereka tidak bersifat historis. Mereka terlalu abstrak, karena mereka memandang manusia sebagai lepas dari hubungan-hubungan kemasyarakatan yang melahirkan manusia itu. Padahal usaha Marx ialah menerapkan materialisme yang dialektis kepada hidup kemasyarakatan, bukan secara teoritis, melainkan secara praktis, guna mengubah hidup kemasyarakatan itu.

Dengan cara yang luar biasa ekonomi dihubungkan dengan filsafat. Teori yang dijabarkan dari situ seluruhnya diperhambakan kepada aktivitas. Yang penting adalah perbuatan, bukan pikiran, juga bukan kemauan.

Latar belakang pribadi Karl Marx: Marx lahir dalam tahun 1818 sebagai anak ketiga suatu keluarga Yahudi di kota Trier, Jerman. Dalam tahun 1835 ia pergi ke Bonn sebagai mahasiswa, tetapi setelah baru setahun di kota itu

ia pindah ke Berlin, Ibukota Prusia dan pusat hegelianisme. Di sana ia berhubungan dengan kaum hegelian kiri. Penafsiran konservatif dari filsafat Hegel seperti yang diajarkan di Berlin ia tolak, tetapi ia juga tertarik oleh gagasan tentang dinamika historis, sejarah terwujudnya kebebasan, yang terkandung di dalam filsafat Hegel. Dalam tahun 1842, sesudah masa kemahasiswaannya, ia menjadi wartawan di Jerman barat daya, yaitu menjadi redaktur surat kabar radikal *Rheinische Zeitung*, yang setahun kemudian dilarang oleh pemerintah. Sementara itu Marx menikah, dan berangkatlah ia dalam tahun 1843 ke Paris di mana ia menjadi redaktur *German-Fench Year books*, (Buku-buku Tahunan Jerman-Perancis). Dari terbitan-terbitan ini hanyalah satu yang memuat dua karya Marx di masa muda, antara lain *A critique of Hegel's philosophy of law* (Suatu kupasan mengenai filsafat hukum Hegel).

Di Paris ia berjumpa dengan Friedrich Engels. Engels lahir dalam tahun 1820 dan dibesarkan dalam keluarga yang sangat tekun beragama. Tetapi pada usia muda ia sudah kehilangan keyakinan agamanya sesudah mengalami krisis hebat. Ayahnya seorang pengusaha pabrik yang kaya, dan sang ayah itu mengharapkan bahwa anaknya yang lelaki itu akan melanjutkan usahanya. Memang Friedrich Engels melaksanakan keinginan ayahnya itu, tetapi ia menjadi seorang pengusaha yang sangat menaruh rasa iba terhadap nasib kaum buruh. Tulisannya *The situation of the laboring class in England* (Situasi kelas pekerja di Inggris) menjadi bukti perasaannya ini. Marx dan Engels menjadi sahabat, hal

mana mengakibatkan kerjasama yang intensif yang baru berakhir pada saat meninggalnya Marx dalam tahun 1883. Dalam tahun 1845, Marx diusir dari Paris, ia menyingkir ke Brussel. kemudian kembali sekali lagi ke Jerman, tetapi akhirnya sampai di London di mana ia menghabiskan sisa hidupnya dengan studi dan menulis, namun juga terlibat secara intensif dengan gerakan buruh sosialis. Di London Marx hidup dalam keadaan yang menyedihkan, tetapi selalu ditolong oleh Friedrich Engels yang tetap menjadi sahabat karib yang setia bagi tokoh yang wataknya tidak mudah dan kadang-kadang bahkan sangat egosentris itu.

Marx dan Engels, baik sendiri-sendiri maupun dengan kerja sama yang erat telah banyak sekali menerbitkan karya-karya. Keseluruhan produksi mereka meliputi empat puluh jilid. Termasuk karya yang paling terkenal ialah yang sudah disebut di atas : *A critique of Hegel's philosophy of law, Economic and philosophical manuscripts* (1844) (Kupasan filsafat hukum Hegel, Manuskrip-manuskrip ekonomi dan filsafat); *The German ideology* (1845/46) (Ideologi Jerman); *The communist manifesto* (1848) (Manifesto komunis). Dalam tahun 1857 terbitlah *Outlines of a critique of political economy* (Garis-garis besar suatu kupasan mengenai teori ekonomi), dan dalam tahun 1867 terbit bagian pertama dari *Capita* (Modal). Bagian II dan Bagian III diterbitkan berturut-turut dalam tahun 1885 dan tahun 1887 oleh Engels. Engels sendiri menerbitkan karya yang telah disebut di atas, ialah *Situation of the laboring class in England*. Kemudian *Herr Eugen Duhring's revolution in science* (Revolusi Herr Eugen Duhring dalam ilmu pengetahuan) dan *Dialectics of*

nature (Dialektika alam) yang diterbitkan dalam tahun 1925 lama sesudah penulisnya meninggal.

Sebagian dari tulisan-tulisan masa muda, antara lain *Economic and philosophical manuscripts* dan bagian-bagian dari *The German ideology*, baru diterbitkan untuk pertama kali dalam tahun 1932. Dari fragmen-fragmen itu tampaklah tampil ke depan seorang Marx yang lain daripada yang dapat diharapkan atas dasar pembacaan *Capital*. Tulisan-tulisan masa muda itu lebih bersifat filosofis dan humanistik, dan lagi pula voluntarisme tampak lebih ditekankan. Karya Marx tua jauh lebih bersifat ekonomi, dan di dalamnya rupa-rupanya tekanan telah bergeser ke cara memandang yang deterministik. Keadaan ini menimbulkan pertentangan penafsiran yang hebat: apakah Marx yang sesungguhnya itu Marx di kala muda atau Marx ada masa tua?

Asumsi yang mendasari teori sosial Marx :

- a. Gagasan bahwa manusia tidak memiliki kodrat yang persis dan tetap adalah bagian dari pendekatan holistik Marx terhadap penjelasan sosial. Tindakan- tindakan, sikap-sikap dan kepercayaan-kepercayaan individu tergantung pada hubungan-hubungan sosialnya dan hubungan-hubungan sosialnya tergantung pada situasi kelasnya dan struktur ekonomis dari masyarakatnya. Kodrat manusia, oleh karena itu, bersifat sosial dalam arti bahwa manusia tak mempunyai kodrat lepas dari apa yang diberikan oleh posisi sosialnya.

b. Marx menyamakan basis sebab-akibat dari masyarakat dengan “kekuatan-kekuatan produksi”, yaitu dengan “apa yang dihasilkan dan bagaimana sesuatu dihasilkan”. Kekuatan-kekuatan produksi ini mencakup bahan-bahan mentah, hasil-hasil akhir dan seluruh metode kerja yang dipakai dalam proses-proses produksi, termasuk alat-alat dan keahlian-keahlian mereka yang bekerja. Basis ekonomis masyarakat ini, yang darinya segala sesuatu yang lain diturunkan, menyaturagakan segala faktor yang menyebabkan produksi suatu benda tertentu dengan cara tertentu.

Marx membedakan jenis-jenis masyarakat atas dasar cara-cara produksi masyarakat-masyarakat tersebut. Menurut skema Marx, sejarah adalah sebuah kemajuan dari masyarakat primitif ke masyarakat perbudakan dan kemudian menjadi feodalisme, kapitalisme dan pada akhirnya menuju ke komunisme. Analisis- analisisnya yang paling rinci adalah mengenai peralihan dari feodalisme ke kapitalisme dan perkembangan kapitalisme melalui berbagai langkahnya menuju penghancuran diri terakhirnya. Dengan melihat ini secara sedikit rinci, kita akan melihat bagaimana dia menghubungkan struktur sebuah masyarakat dengan jenis pembagian kerja yang dilangsungkan dalam sistem produksinya. Manusia dilahirkan dalam masyarakat, di mana hubungan-hubungan miliknya telah dipastikan.

Fenomena sosial yang dipertanyakan dan dijelaskan ialah:

- Negara terlibat dalam konflik melalui paksaan dalam bidang hukum untuk memelihara lembaga sosial (integrasi).
- Kesenjangan sosial merupakan sumber utama konflik.
- Alienasi terjadi karena keterasingan dari sarana dasar produksi, sarana subsistem dan pekerjaan.
- Kelas adalah motor dari segala perubahan serta kemajuan.
- Sejarah kehidupan manusia tidak lebih dari pertentangan antar kelas atau antar golongan. Sekalipun pertikaian antar kelas selalu menandai jalannya sejarah, pelaku-pelaku dalam perjuangan kelas ini selalu berganti dan berubah dalam setiap jamannya.

Konsep-konsep penting :

- a. Emansipasi : adalah pembebasan dari perbudakan atau persamaan hak dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Emansipasi tidak hanya dalam bidang politik tetapi juga emansipasi manusia secara universal.
- b. Kedaulatan : terdapat pada semangat komunisme yang akan mengatur kehidupan manusia di dunia. Tidak ada lagi kedaulatan suatu negara, tetapi yang ada ialah kedaulatan seluruh umat manusia.
- c. Alienasi : ialah keadaan di mana manusia dikuasai atau diperbudak oleh sesuatu yang diciptakannya sendiri. Ada dua macam alienasi yaitu alienasi agama

dan alienasi sekuler. Alienasi agama, menurut Marx, terjadi karena manusia diperbudak oleh agama dan Tuhan yang merupakan personifikasi manusia. Agama dipandang sebagai candu. Alienasi sekuler dapat dibedakan antara alienasi ekonomi (manusia diperbudak oleh yang dia ciptakan), alienasi negara (manusia diperbudak oleh aturan negara yang diciptakan manusia), alienasi sosial (manusia terasing di dalam keluarga dan masyarakat), serta alienasi pekerjaan (alienasi hasil produksi, alienasi proses produksi, alienasi diri sendiri dan alienasi dari pergaulan akibat suatu pekerjaan).

- d. Teori praxis : Teori tidak hanya menjelaskan hubungan antar konsep, tetapi juga harus mampu mengubah masyarakat menuju kemajuan.
- e. Perubahan sosial : Marx menunjukkan keyakinan yang teguh mengenai analisis perubahan struktural. Ia juga telah membangun sebuah model masyarakat (kapitalisme) untuk tujuan analisis perubahan struktural. Perubahan struktural hanya dapat dicapai melalui pergolakan revolusioner.

Proposisi :

- Negara terlibat dalam konflik melalui paksaan dalam bidang hukum untuk memelihara lembaga sosial (integrasi).
- Kesenjangan sosial merupakan sumber utama konflik.
- Alienasi terjadi karena keterasingan dari sarana dasar produksi, sarana subsistem dan pekerjaan.

- Kelas adalah motor dari segala perubahan serta kemajuan.
- Sejarah kehidupan manusia tidak lebih dari pertentangan antar kelas atau antar golongan. Sekalipun pertikaian antar kelas selalu menandai jalannya sejarah, pelaku-pelaku dalam perjuangan kelas ini selalu berganti dan berubah dalam setiap jamannya.

6. Kemajemukan Masyarakat*)

Rabuskha dan Shepsle memfokuskan pada ciri-ciri preferensi individu dalam masyarakat plural. Di dalam bagian ini, dengan memakai ciri-ciri tersebut, kita akan menelaah dinamika kompetisi etnis dan menarik beberapa hasil teoritis. Gambaran ikhtisar dinamika tersebut mengungkapkan 5 ciri yang berbeda, yaitu :

1. Kerjasama etnis pra-kemerdekaan
2. Kerjasama etnis paska-kemerdekaan : ambiguitas
3. Menuntut generasi dan pentingnya etnisitas yang meningkat
4. Kalah dan merosotnya koalisi multietnis
5. Intrik elektoris dan ketidakpercayaan

Kerjasama Etnis Pra-Kemerdekaan

Peninjauan pengalaman historis masyarakat plural mengungkapkan regularitas pertama yang penting : Eksistensi kerjasama etnis tingkat elit pada periode pra-kemerdekaan. Selama periode ini, komunitas etnis tidak banyak menjadi pesaing satu sama lain, seperti di dalam kompetisi dengan pesaing umum. Eksistensi aturan asing mendorong kerjasama dalam etnis dan pendalaman etnis. Warga pribumi kelas menengah, yang mendapat peraturan asing yang terberat, dengan sedih sadar akan kesempatan-kesempatan yang tertutup bagi penduduk asli. Sedangkan rakyat pribumi mampu menerima segala macam penghinaan yang mereka derita (dan diragukan

bila penghinaan-penghinaan itu berkurang setelah kemerdekaan), tetapi masyarakat menengah tidak dapat menerima penghinaan-penghinaan itu. Oleh karena itu, Kamisese Kapawai Tuimacilai Mara, ketua baru kelompok politik Fiji, dideskripsikan oleh “New York Times” sebagai orang Fiji dari kelas menengah yang merasakan penghinaan dari penguasa kolonial Inggris. “Dikatakan bahwa penghinaan yang diterimanya dengan mendapatkan gaji yang lebih rendah dari orang Inggris yang melakukan pekerjaan yang sama memperkuat tendensi nasional pemimpin muda yang berpendidikan tinggi ini. Persepsi ketidakadilan, penghinaan, dan tertutupnya kesempatan umum untuk mencapai prestasi dan peningkatan diri diperkuat oleh perjanjian-perjanjian yang sering dilakukan dengan administrator asing (sebagai contoh : pengurusan surat-surat profesional, negosiasi bisnis, dll). Sebagai akibatnya, anggota kelas menengah mendorong untuk melakukan kerjasama untuk menjadikan eksploitasi dari pihak luar memakan banyak biaya, dan sedapat mungkin tidak berhasil.

Ada pula dorongan kerjasama yang lain. Perlawanan besar-besaran dan tuntutan untuk mendapatkan tambahan kesempatan berakibat pada pemberian rasionalitas bagi negara untuk melepaskan diri. Dan lagi, fakta bahwa kaum kolonialis memegang bagian yang lebih besar di bidang ekonomi dan kekuasaan untuk mengalokasikannya, dan bahwa perlawanan yang terkoordinasi dibutuhkan penggerak untuk kerjasama mutual. Shils menyatakan bahwa hasil yang menguntungkan dari faktor ini adalah elit nasionalis

secara intensif sedikit merasa terganggu oleh pembagian komunal dalam tingkatan mereka.

Kasus Ceylon merupakan contoh :

Didalam awal kehidupan gerakan otonomi politis, timbul harapan dan keinginan bahwa perjuangan untuk mendapatkan pemerintahan sendiri bagi Ceylonese akan menyatukan Sinhalese dan Tamils dalam tujuan bersama. Kelas menengah yang aktif secara politis merupakan multikomunal didalam komposisi dan pandangannya bersifat relatif kosmopolitan. Didalam kelas ini, identitas komunal tidak dihapus dan pernikahan jarang melompati hambatan-hambatan komunal, hubungan antara Sinhalese dan Tamils tidak hanya bebas dari ketegangan, tetapi juga seringkali bersifat baik dan hangat. Hal itu merupakan suatu tanda "modernitas" yang menolak adanya sentimen komunal yang dianggap kejam dan atavisme.

Seiring dengan kemerdekaan yang diakui, atau hampir diakui, koalisi multietnis yang mendominasi perjuangan untuk merebut kemerdekaan menjadi terbatas. Akan tetapi, dalam beberapa hal tindakan kerjasama diantara beberapa elit etnis terinstitusionalisasi didalam kerjasama ekonomi dan terutama asosiasi politik. Periode paska-kemerdekaan menjadi saksi dalam usaha untuk membentuk koalisi bersama multietnis yang besar.

Kerjasama Etnis Paska-Kemerdekaan : Ambiguitas

Geertz menggambarkan masalah dalam menghadapi koalisi multietnis atau asosiasi politis :

Pola yang nampaknya berkembang dan mungkin mengkristal adalah salah satu pola dimana partai nasional yang bersifat komprehensif muncul dalam negara dan berkali-kali diserang oleh partai-partai kecil Masing-masing saling berusaha mematahkan yang lain dengan cara menyerang titik ketegangan yang muncul dan berkembang seiring dengan berfungsinya partai tersebut dan dengan cara menarik lebih terbuka pada sentimen primordial.

Ketegangan yang berkembang dalam tingkat koalisi multietnis dapat dilacak secara langsung melalui perubahan didalam "aturan permainan". Setelah kemerdekaan, isi politik adalah distribusi. Kekuasaan kolonial (atau sejenisnya) tidak lagi menjadi pesaing, mereka meninggalkan negara bekas jajahan yang bertengkar mempermasalahkan "siapa yang mendapatkan apa, kapan, dan bagaimana". Oleh karena itu, dari sudut pandang koalisi multietnis, permainan telah berkurang tidak lagi melawan kaum kolonialis, tetapi berbalik melawan diri sendiri. Situasi politik, yang pada awalnya merupakan permainan ekstrasi, sebagai contoh ekstrasi keuntungan dan kelompok dominan, telah diubah menjadi permainan divisi diantara anggota-anggota koalisi yang menang. Keuntungan dari pengeluaran

patner koalisi, sekarang menjadi kemungkinan yang berbeda.

Meskipun berada didalam keindividuan konteks baru, aktivis politis yang turut berjuang dalam meraih kemerdekaan memiliki kepentingan untuk menjaga organisasi politis. Secara psikologis sangat sulit dan secara politis berbahaya bagi seorang nasionalis yang hebat, untuk membelokkan alasan (beserta dengan manifestasi institusional, koalisi multietnis) untuk apa mereka berjuang sekian lama.

Lalu bagaimana caranya koalisi multietnis yang besar memecahkan ketegangan yang dihadapinya, dan secara lebih khusus, bagaimana koalisi tersebut menangani dorongan yang lebih terbuka kearah sentimen primordial yang disuarakan oleh pemimpin-pemimpin lawan. Teknik yang digunakan pada intinya ada 2 cara. Di satu sisi, pemimpin menumbuhkan tuntutan atas masalah nasional (sebagai lawan dari masalah komunal), sebagai contoh: perkembangan ekonomi, integritas teritorial. Di sisi lain, pemerintah menganggap masalah komunal divisif sebagai ambigu.

Teknik pertama, menuntut generasi atas masalah nasional, memungkinkan koalisi multietnis menghindari distribusi politik. Partai-partai kecil yang mencari keuntungan distributif komunal secara mudah dapat disalahkan karena usahanya yang tidak besar dalam pendirian negara, dengan cara menghalangi pertumbuhan ekonomi dan membahayakan fiabilitas rezim yang baru.

Musuh-musuh eksternal ditemukan dan dibesar-besarkan oleh kondisi untuk menilai tuntutan mereka atas tindakan penghianatan pada kepentingan komunal. Sebenarnya, didalam beberapa contoh, prerogatif demokratis tergantung pada kepentingan mempertahankan integritas negara baru.

Tuntutan generasi atas pentingnya masalah nasional merupakan masalah strategi yang sangat cocok untuk koalisi multietnis, terutama karena koalisi tersebut biasanya merupakan satu-satunya organisasi politis nasional. Alasan semakin sedikitnya pesaing adalah karena kepentingan komunal. Koalisi adalah satu-satunya partai, oleh karena itu, ia memiliki tuntutan legitimasi pada konstituensi nasional. Posisi dominannya didalam persoalan nasional yang luas yang memperkenalkannya untuk tetap mempertahankan kepemimpinan.

Untuk berhadapan dengan rangkaian masalah komunal divisif secara potensial, koalisi multietnis menumbuhkan ambiguitas dengan sengaja. Seperti yang telah kami katakan sebelumnya, individu-individu didalam masyarakat yang plural mempunyai preferensi yang bagus disepanjang dimensi ini. Kondisi ini dapat diperlihatkan secara matematis dimana kebijaksanaan ambigu menghasilkan hasil elektoral.

Sebagai contoh, kami memperlihatkan kasus bikomunal. Masing-masing komunitas sangat menyukai tatanan nilainya sendiri, seperti yang ditunjukkan oleh konvesitas fungsi preferensi. Bagaimana masing-masing masyarakat akan bereaksi terhadap pernyataan ambigu dalam dimensi ini? Secara khusus, seandainya koalisi multietnis,

melalui tindakan dan ekspresi yang sesuai, diterima oleh seluruh warga sebagai lotere, sebagai contoh $\frac{1}{2} A, \frac{1}{2} B$. Dengan memakai aturan penentuan utilitas yang diharapkan, seseorang dapat menentukan nilai tiap komunitas yang berada di dalam koalisi multietnis. Utilitas lotere $L = (\frac{1}{2} A, \frac{1}{2} B)$, sebagai contoh masing-masing A dan B dengan probabilitas 0.5 direpresentasikan oleh titik tengah tali yang menghubungkan titik $(A, (A))$ dan $(B, (B))$. Catatlah bahwa utilitas yang diharapkan dari lotere ini, $x(L)$, sama dengan utilitas alternatif tertentu X^* , dan bahwa posisi X^* secara relatif dekat dengan titik preferensi komunitas A.

Kalkulasi analogi warga negara dalam masyarakat B menunjukkan utilitas yang diharapkan dari lotere L sama dengan utilitas titik Y^* . Y^* merupakan ekuivalen pasti dari L. catatlah lagi bahwa Y^* secara relatif dekat dengan titik preferensi masyarakat B.

Setiap masyarakat menempatkan nilai tinggi pada lotere $L = (\frac{1}{2} A, \frac{1}{2} B)$ sebenarnya Karena preferensinya bertentangan. Untuk A, lotere L dipreferensi sebesar X^* ; untuk B, lotere B dipreferensi sebesar Y^* . Dan masing-masing masyarakat secara relatif terpuaskan oleh ekuivalen kepastian perspektif.

Walaupun hasil tersebut tidak jelas, catatan logika kita membujuk kita bahwa ambiguitas tujuan cocok dan karenanya merupakan strategi rasional dengan cara memperbolehkan adanya daya pendorong dalam kelompok yang memiliki preferensi pertentangan. Jika koalisi multietnis berhasil memusatkan perhatiannya pada masalah nasional (non etnis) dan jika koalisi tersebut

menetralkan masalah etnis devisif melalui ambiguitas, maka koalisi tersebut harus tetap mempertahankan peran kepemimpinan. Meskipun koalisi dapat dikalahkan secara marginal pada masalah etnis, koalisi tersebut berhasil karena masalah etnis tersebut tidak penting.

Sebuah contoh pemakaian ambiguitas sebagai strategi politik yang menjauhkan komunalisme ditemukan dalam partai Alliance Malaya, sebuah koalisi 3 partai etnis secara eksplisit. Pada pemilihan umum tahun 1959, partai Alliance bertindak secara ambigu atas masalah yang didasarkan komunal yang memecah keanggotaan Melayu, China dan India dari koalisi. Dengan masyarakat yang terpisah secara rasional, koalisi mengembangkan pendekatan kearah masalah rasional yang tidak memerlukan komitmen yang tak dapat dibatalkan dari satu sisi atau dari sisi yang lain.

Selama kampanye, kepemimpinan Partai Alliance menunjukkan beberapa ambivalensi terhadap masalah komunal. Di satu sisi, Tunku Abdul Rahman menarik komunal untuk mendukung Melayu, menekankan bahwa masalah komunal “bahaya asing” dan ancaman bagi orang-orang Melayu yang ditimbulkan oleh imigrasi pendatang luar. Di sisi lain, Tunku Abdul Rahman mempertahankan manifesto alliance yang mengatribusikan “bahaya asing” kedalam persyaratan warganegaraan yang terbatas, yang membuat sulit orang-orang Melayu yang membutuhkan status penuh sebagai warga negara Melayu. Oleh karena itu, partai Alliance bermaksud untuk menggunakan masalah “ancaman luar negeri” untuk menarik perhatian ke Melayu, tetapi dengan

cepat dijelaskan pada anggota Assosiasi China Melayu dan kongres India Melayu bahwa orang-orang China dan India dalam 2 organisasi ini bukanlah bagian dari "ancaman luar negeri itu". Contoh ini hanya satu dari banyak contoh yang memakai ambiguitas secara sukses untuk mempertahankan penyatuan elemen yang tidak layak untuk tindakan politis umum.

Tepatnya pemakaian strategi menuntut generasi untuk masalah nasional dan ambiguitas untuk masalah etnis telah dibuktikan secara formal. Pemakaian strategi itu oleh beberapa masyarakat plural telah diverifikasi dalam bagian kedua. Akan tetapi seperti yang telah diidentifikasi oleh pemeriksaan dalam bagian selanjutnya, hasil strategi ini, dari kasus demi kasus, adalah munculnya etnisitas sebagai konsiderasi politis yang dominan. Aktivitas menumbuhkan tuntutan di dalam bagian koalisi multietnis secara temporer menekan definisi etnis atas politik, tetapi aktivitas itu tidak mengubah preferensi ataupun secara menyeluruh mengubah konsiderasi etnis.

Menuntut Generasi dan Pentingnya Etnisitas Yang Meningkat

Kesetiaan dalam masyarakat plural bersifat komunal, bukan nasional. Preferensi komunal bersifat kuat. Masalah nasional, meskipun penting, tidak mempunyai kekuasaan. Sebagai hasilnya, koalisi multietnis hanya mampu hidup singkat.

Apa yang menerangi manifestasi komunalisme? Jawabannya jelas kompleks, dan intinya bergantung pada

peristiwa sejarah. Beberapa penjelasan telah diberikan pada penekanan (asumsi) kami pada preferensi individu dan motif-motif politik, dan sebagai konsekuensinya, beberapa regularitas empiris tidak dijelaskan.

Sumber pertama meningkatnya komunalisme adalah karakter distributif periode paska-kemerdekaan. Karena pemerintah menjadi lebih responsif terhadap kepentingan penduduk asli, peraturan internal distribusi menjadi lebih penting.

Sebagai hasilnya, warganegara dari masyarakat yang berbeda berbalik saling melawan. Kelangkaan sumber daya alam dan pertentangan yang serius, mengimplikasikan bahwa preferensi orang-orang dipuaskan oleh orang lain. Kenyataan bahwa pemerintah menjadi kekuatan penduduk asli yang penting dalam alokasi sumber daya-sumber daya tersebut hanyalah memperburuk masalah.

Sumber kedua meningkatnya konflik yang akhirnya berbalik kearah komunal adalah terlalu besarnya kondisi koalisi multietnis. Dengan berdirinya negara baru dan lenyapnya kekuasaan kolonial (jika ada), sebagai akibatnya koalisi multietnis menjadi koalisi keseluruhan. Dan bagi sebagian besar susunan struktural, koalisi keseluruhan lebih besar daripada pembuatan keputusan secara kolektif. Seringkali terdapat dorongan positif bagi beberapa sub-koalisi untuk mengeluarkan anggota yang masih ada. Kriteria komunal seringkali menentukan siapa yang dikeluarkan dan siapa yang boleh tetap tinggal.

Faktor-faktor ini, karakter distributif politik dan eksistensi koalisi yang besar, ketika dipadukan dengan

otoritas pembuatan keputusan kemerdekaan, mendorong sentimen komunal. Dengan ditambahi institusionalisasi sentimen primordial, eksistensi ketakutan komunal dan ketidakamanan, peraturan baru distribusi selalu mengikuti garis kontrol.

Akan tetapi, sesuatu hal harus merangkai proses keseluruhan dalam suatu gerakan. Peristiwa historis menyediakan katalis dalam beberapa hal, sebagai contoh peristiwa eksternal, wafatnya pemimpin politik, perubahan dibidang ekonomi, dll atas kepentingan yang lebih besar yang merupakan tingkah laku politisi komunal. Pemimpin etnis yang dikeluarkan dari koalisi multietnis ataupun yang masyarakatnya diabaikan secara sistematis, mendapatkan dorongan untuk mengetnisasi politik. Itu merupakan respon terhadap kurangnya perhatian komunalisme yang dilakukan dengan cara mengatur koalisi, tidak memasukkan politisi yang mempunyai dorongan untuk “bermain api” chauvinisme etnis. Geertz, seperti biasanya menyatakan :

... Terdapat lingkaran disekitar munculnya institusi pemerintahan negara baru, dan politik khusus yang cenderung mereka dukung, keseluruhan pusanan penguatan ketidakpuasan primordial dan para politis merupakan hasil yang besar untuk meneruskan metafora, akibat buruk proses politik itu sendiri.

Ada 2 kesimpulan penting untuk diambil. Pertama, koalisi multietnis secara inheren tidak stabil, menjadi mudah diserang untuk dibalikkan, menuntut generasi

untuk memfokuskan pada chauvinisme etnis. Kedua, terdapat politisi yang kepentingannya menuntut dukungan chauvinisme etnis. Konsekuensi yang nampaknya muncul: meningkatnya frekuensi daya dorong etnis yang membatasi kesatuan koalisi yang memimpin. Contoh yang jelas meliputi : “apanjaht” politik di Gulana Inggris, “Sinhalese only” di Ceylon; apartheid di Afrika Selatan dan Rhodesia; “Enosis” gerakan di Cyprus; “anti-katolikisme” di Ulster, “kekuasaan hitam” di Thailand, “sentimen separatis” di Belgium : secessionisme di Nigeria, Chad, dan Ethiopia, “sentimen pan-Indonesia” di Melayu, dan permusuhan melawan India dan Arab di dalam Afrika Timur Inggris dimasa lalu.

Kalah dan Merosotnya Koalisi Multietnis

Argumentasi kami dalam hal ini adalah bahwa politik didalam periode paska-kemerdekaan mengarah pada persamaan distributif bahwa kriteria distribusi menyiksa koalisi multietnis untuk menghasilkan ketegangan, dan bahwa pemecahan sebenarnya mengiringi bertambah pentingnya dimensi etnis. “Didalam perjuangan etnis...afiliasi...menjadi simbol yang penting bagi penjajaran politis, simbol dimana politisi yang ambisius berusaha untuk memanipulasi”.

Konsekuensi dari semakin pentingnya etnisitas bersifat merusak koalisi multietnis dan representatif lain dari moderasi politis. Sebagaimana yang oleh Sarton teliti. “Tidak seperti di pasar, di dalam politik tidak ada acara untuk melindungi “kompetisi tidak adil”, demagogi, kekalahan, perjanjian tanpa substansi”. Di dalam

masyarakat plural, cepat atau lambat, “kekalahan menjadi aturan permainan. Semua orang dipersiapkan untuk memberikan lebih banyak atau lebih sedikit, dan gertakannya tidak dapat dilihat. Situasi ini bukan lagi situasi yang memperbolehkan bertahannya suatu sistem politis berdasarkan perjanjian dan kekalahan merupakan negasi politik kompetitif.

Ciri-ciri teoritis dari observasi ini diulang kembali. Pertama, politisi yang ambisius tidak termasuk dalam koalisi multietnis yang mendorong berkembangnya tuntutan lebih pada komunal daripada masalah nasional. Karena merupakan partai nasional satu-satunya, koalisi multietnis nampaknya tidak hilang ketika masalah nasional menjadi penting. Posisi koalisi multietnis menjadi bertambah lemah karena pentingnya masalah komunal meningkat. Kedua, politisi komunal dapat mengalahkan kandidat koalisi multietnis, yang posisinya didalam masalah etnis bersifat ambigu, hanya dapat mengambil posisi ekstrim. Yaitu, hanya titik-titik didalam interval (A, X^*) dan ($Y^* B$) yang lebih disukai dalam lotere koalisi multietnis oleh masyarakat etnis respektif. Secara singkat, secara komunal didasarkan pada entrepreneur politik untuk meningkatkan pentingnya masalah komunal dan kemudian untuk mengalahkan koalisi multietnis yang ambigu.

Konsekuensi dari bertambah pentingnya etnisitas bermacam-macam. Konsekuensi yang pertama adalah lenyapnya institusi perantara, merupakan contoh utama dari koalisi multietnis. Penawaran berhenti, dan tindakan kerjasama termanifestasi hanya ketika keuntungan mutual

dapat dicapai. Akan tetapi, sulit bagi anggota institusi perantara untuk saling berkerjasama ketika secara terus-menerus memperbaiki pagar-pagar didalam masyarakat etnis mereka sendiri, aktivitas dipentingkan oleh tindakan “menghembuskan api” dari politisi etnis yang ambisius.

Kasus Ulster bersifat instruktif. Bahkan sebelum Reverend Ian Paisley muncul, kerjasama antar katolik dan protestan sangat sulit. Pada pertengahan tahun 60-an Kapten O'Neill (Unionist Premier of Northern Ireland) membuat jembatan, yang secara simbolis digambarkan dengan undangannya untuk perdana menteri Republik Irish sampai Belfast. Pendukung Katolik memandangnya sebagai suatu usaha murni dalam rekonsiliasi, dibawah kepemimpinan Mr. Eddie McAtees untuk pertama kalinya menjadi oposisi resmi di Stormont. Akan tetapi posisi perdana menteri bersifat tidak dapat dipertahankan, seperti yang telah diindikasikan oleh ketidakpopuleran kunjungan didalam lingkaran Unionis. Hal tersebut menimbulkan peringatan diantara pendukung yang kuat, dan didalam tahun selanjutnya, kelompok belakang dibentuk untuk mengawasi tindakan kapten O'Neill dimasa mendatang....”. Secara singkat, setelah Reverend Paisley memulai kampanye protes publik, ia ditangkap dan ditahan untuk pertama kalinya.

Tidak hanya partai saja yang gagal untuk tetap secara luas berdasarkan pada institusi perantara, menjadi disamping berorientasi secara komunal, komunikasi dan kerjasama antar partai juga menentang pemeliharaan. Salah satu manifestasi diberikan oleh preposisi teoritis

Haefele. Dia menunjukkan jika ruang lingkup badan pengambil keputusan dibatasi pada satu masalah, dengan demikian semua masalah yang muncul sebelumnya nampaknya sangat saling bergantung, sehingga pemilihan perdagangan hanya dapat memainkan peranan-peranan kecil dalam pengambilan keputusan". Yaitu, jika suatu kriteria substantif tunggal mendefinisikan nilai masalah untuk semua pelaku, kemudian melakukan penawaran, membalas jasa, dan aktivitas "*Quid Pro Qua*" juga dimasukkan. Aktivitas semacam itu hanya mungkin apabila beberapa jenis masalah-masalah yang penting muncul, masalah-masalah tersebut menerima solusi penawaran. Tetapi, dalam masyarakat plural semua masalah dipandang dalam terminologi implikasi etnis mereka. Dan nilai-nilai bertentangan dengan semua masalah yang tumbuh. Dengan demikian, Premis Proposisi Haefele bertemu; kesimpulan yang mengikutinya: tidak ada batang kayu untuk menggulung.

Konsekuensi ketiga berpangkal pada bertambah pentingnya etnisitas adalah etnisisasi barang-barang yang tersedia secara kolektif. Didalam masyarakat plural, barang-barang yang diproduksi dengan keputusan politik dikonsumsi bersama-sama, sebagai contoh: pendidikan, pertahanan, proteksi polisi. Konsumsi barang-barang ini, dalam banyak hal, bebas dari kemampuan untuk membayar atau kekuatan membeli, membedakan mereka dari barang-barang privat yang disuplai dalam pasar. Sebagai contoh, dalam kasus pertahanan, seluruh warganegara mendapat keuntungan dari penyimpanan nuklir apakah mereka membayarnya atau tidak.

Sebenarnya, kemampuan penghindari pajak untuk mengkonsumsi barang-barang ini memberikan dua karakteristik pembeda barang-barang kolektif :

Bersama-sama menyuplai, konsumsi oleh beberapa individu tidak menghalangi konsumsi oleh yang lainnya.

Non-ekskludabilitas, kriteria yang membedakan mereka-mereka yang diperbolehkan mengkonsumsi barang-barang dari mereka yang tidak diperbolehkan.

Hal ini, tentunya, tidak dapat diartikan bahwa tidak ada konflik dalam alokasi barang-barang sektor publik didalam masyarakat plural. Sebaliknya, ada sedikitnya 2 macam konflik. Pertama, biaya oportunitas yang dimunculkan oleh mereka-mereka yang menyukai investasi besar kekayaan publik didalam publik alternatif. Kedua, karena kekayaan kolektifitas diinvestasikan untuk barang-barang privat dan publik, sebagai contoh : berkurangnya biaya rata-rata pos untuk konsumen tertentu, subsidi pertanian, perizinan pengurangan minyak, muncul konflik yang jelas terlihat pada proyek-proyek yang mendapatkan bantuan uang (tidak membicarakan masalah apakah barang-barang privat harus disumbang).

Dalam masyarakat plural, pemberian konsumsi barang-barang publik merosot karena semakin pentingnya etnisitas. Karena etnisitas menjadi makin penting, setiap keputusan politik menolong suatu masyarakat dan menghalangi masyarakat yang lain. Dengan demikian,

barang-barang publik yang diberikan dari keputusan politik diberikan untuk kepentingan masyarakat etnis.

Non-ekskludabilitas, yang merupakan karakteristik barang-barang publik telah dilanggar. Etnisitas berperan sebagai basis eksklusi. Dan masyarakat yang disingkirkan secara jelas dianggap sebagai masyarakat yang secara publik jelek.

Despres menggambarkan konsekuensi etnisitas ini didalam pengalaman British Guina :

Pertimbangkan konstruksi pusat kesehatan baru yang didirikan oleh pemerintah. Akankah pemerintah mendirikan fasilitas tersebut di desa yang didominasi oleh orang-orang Afrika seperti Ann Grove, ataukah pusat itu akan didirikan didekat desa Indian di Clonbrook?, dimana kira-kira akan didirikan sekolah baru? atau, siapa yang akan menjadi ketua komite pengembangan regional? Siapa yang akan memproses lamaran untuk pinjaman di kantor distrik tabungan kerjasama dan masyarakat peminjam?. Pada akhirnya, keputusan-keputusan tersebut akan memilih individu-individu yang dalam beberapa hal memiliki hubungan komunal. Meskipun pemerintah mungkin tidak mempertimbangkan keputusan-keputusan tersebut sebagai berbau politis, menurut orang-orang Afrika dan Indian, keputusan-keputusan itu tetap berbau politis.

Implikasi utama eksklusi sekelompok masyarakat tertentu dari konsumsi barang-barang publik merupakan suatu tantangan terhadap eksistensi negara. Salah satu tugas pemerintah adalah menyediakan barang-barang publik. Negara dibantu untuk membuat dan menyediakan secara kolektif apa yang tidak dapat dipenuhi melalui tindakan privat. Meskipun “barang-barang” yang disediakan pada awalnya mengambil bentuk integritas teritorial dan keamanan fisik (oleh karenanya, barang-barang tersebut disebut barang-barang Hobbes), ruang lingkungannya telah diperluas didalam negara modern. Kegagalan masyarakat plural untuk mengeluarkan non-ekskludabilitas memperkuat sentimen komunal; Individu-individu mencari sumber-sumber alternatif barang-barang publik, disebut dengan masyarakat etnis, dan oleh karenanya, alternatif tersebut mendasari kenegaraan. Oleh karena itu, dapat kita lihat bahwa komunalisme pada awalnya mengembangkan tindakan-tindakan ilegitimasi, yang sebaliknya mengurangi keefektifan negara dan lebih jauh lagi memperkut tindakan ilegitimasi.

Akhirnya, kami mengulangi pernyataan yang secara teoritis telah disebutkan di depan, yaitu kebangkrutan moderasi. Moderasi dalam masyarakat etnis merupakan strategi yang dapat terus hidup, hanya jika etnisitas tidak dipandang penting. Pada saat etnisitas menjadi penting, dan sebagai konsekuensinya, semua masalah diinterpretasikan dalam terminologi komunal, retorika kerjasama dan suara-suara untuk saling mempercayai terdengar sangat lemah. Yang lebih penting secara strategis mudah dapat dikalahkan oleh

penghembusan api politik dan pengalihan politik.

Ceylon dan Ulster bekerja di kantor di Landslide Victory karena jabatan moderat. Dudley Senanayake bermain dengan chauvinisme dalam kampanyenya. Di Ulster, ekstrimis protestan, dengan dipimpin oleh Ian Paisley, memimpin partai Unionist untuk memeriksa dan mengubah kemustahilan moderasi.

Intrik Elektoris dan Kekerasan

Karakteristik terakhir politik dalam masyarakat plural yang kami teliti adalah kerusakan prosedur demokratis yang seringkali diiringi dengan kekerasan fisik. Sebagaimana data yang ditunjukkan dalam bagian 2, demonstrasi dan demokrasi merupakan kompetisi yang bebas dan terbuka bagi suara-suara masyarakat. Demonstrasi dan demokrasi tidak kuat didalam lingkungan yang mempunyai preferensi etnis yang besar. Aktivitas menuntut pemimpin yang ambisius, persamaan pentingnya sentimen primordial, dan kekalahan politik, memperlemah komitmen dalam nilai-nilai nasional. Ketika sebuah pendapat mencapai intensitas tertentu dan perpecahan mencapai kedalaman tertentu, maka muncul pergerakan yang menuntut totalitas, bukan kerjasama serta kontrol negara. Maka, tidak mengherankan bahwa perasaan preservasi diri komunal menuntun pada usaha yang telah diperhitungkan untuk memanipulasi peralatan negara guna mengamankan dan mempertahankan keuntungan komunal.

Demokrasi dalam masyarakat plural adalah kausalitas politik komunal. Godaan mayoritas untuk

memperkuat kekuasaannya dengan memaka cara-cara yang tidak demokratis, dan untuk minoritas bergantung pada cara-cara itu untuk meraih kekuasaan semakin kuat. Godaan ini terutama menjadi daya pendorong ketika kelompok dominan secara politik merasa tidak aman. Oleh karena itu, di Ulster, “jika kaum katolik jumlahnya lebih kecil daripada keseluruhan populasi... saling pengertian yang lebih baik mungkin dapat tercapai. Tetapi 35% adalah minoritas, terutama bila 50% anak-anak dibawah umur 15 tahun adalah katolik.”

Konsekuensi intensitas, ketidakamanan, dan godaan untuk memanipulasi susunan politis dapat mempunyai berbagai macam bentuk. Bentuk yang paling dapat dikenali adalah pencabutan hak pilih. Sebagai contoh, masyarakat kulit hitam Rhodesia, Afrika Selatan dan Indian Tamil di Ceylon, secara konstitusional dilarang dalam partisipasi politik yang dilegitimasi.

Tindakan yang kurang langsung mengarah pada konsekuensi yang sejenis dengan pencabutan hak pilih adalah manipulasi aturan pemilihan dan metode merepresentasikannya. Kemayoritasan biasanya didukung oleh masyarakat yang jumlahnya dominan, sedangkan jumlah yang seimbang didukung oleh masyarakat-masyarakat yang jumlahnya lebih seimbang. Dalam hal yang sama, komunitas yang jumlahnya besar menginginkan representasi teritorial, sedangkan bagi masyarakat yang jumlahnya lebih kecil jika secara teritorial ditiadakan, lebih menekankan pada basis representasi komunal.

Metodologi yang berhubungan dengan manipulasi melibatkan kualifikasi hak suara dan perhitungan suara. Di dalam metodologi ini, biasanya prinsip-prinsip mayoritas, beberapa suara dan pemberi suara sama satu sama lain. Oleh karena itu hak suara universal dikualifikasi, sampai baru-baru ini, oleh pemilihan premis bisnis tambahan. Ditingkat pemerintahan lokal, terdapat persyaratan properti yang mengekang, jelas bertentangan dengan kepentingan orang Katolik dan pemilihan-pemilihan suara tambahan untuk perusahaan terbatas (dicabut pada bulan November, 1968). Pengekangan ini tidak diragukan lagi dimotivasi oleh kenyataan bahwa "1 orang, 1 suara" untuk mereka yang berumur 21 tahun secara alami akan diberikan hak suara pada orang protestan dan katolik, dan tentu saja orang katolik lebih banyak diuntungkan.

Di Malaysia, diterapkan pendekatan yang berbeda untuk menghindari hegemoni Melayu. Pemilihan di desa terdiri dari hanya satu setengah pemilih distrik kota, dan mendapatkan representasi yang sama. Tentu saja karena Malaysia di dominasi oleh daerah pedesaan, sedangkan Cina didominasi daerah perkotaan. Hasilnya : satu orang dua suara.

Alat manipulasi umum yang diketahui oleh setiap mahasiswa dibidang perangkat politik adalah pemberian kesempatan dengan curang kepada sebuah partai politik. Kontrol atas penarikan batas-batas pemilihan memperbolehkan masyarakat politik yang dominan untuk mempertahankan hegemoninya sambil tetap mempertahankan sisi depan demokrasi. Untuk menjamin pemberian kesempatan dengan curang kepada sebuah

partai politik, kontrol mobilitas tambahan seringkali digunakan. Oleh karena itu, di Ulster, pemerintah lokal kota telah memberikan kesempatan curang kepada partai politik, memberikan kontrol lokal kepada orang protestan (*unionist*). Majelis lokal yang dikontrol oleh pemerintah lokal mempunyai otoritas atas alokasi perumahan, yang nampak dibiarkan untuk kepentingan golongan *Unionist*. Tujuan utama yang tampak adalah untuk mempertahankan persamaan pemilihan umum yang diadakan dan oleh karenanya, mencegah segala tantangan partai yang mengontrol dewan.

Teknik lain yang membahayakan karakter demokrasi politik adalah : penjeblosan ke dalam penjara pemimpin-pemimpin partai lawan, penurunan pendaftaran partai politik, emigrasi secara paksa, campur tangan militer, intimidasi secara keras. Dan secara singkat, pengekangan secara besar, penyisihan secara penuh dari kompetisi politik melanggar jiwa dan praktik demokrasi.

Masyarakat Plural : Beberapa Variasi

Tulisan ini telah mengkarakterkan masyarakat plural dengan mementingkan dimensi etnis, kekuatan preferensi, pertentangan komunal, dan serangkaian entrepreneur politik yang ambisius. Secara bersama-sama karakter ini mengimplikasikan sejumlah konsekuensi. Walaupun bentuk yang tepat dari konsekuensi ini pada akhirnya bergantung pada kondisi historis dan kondisi eksogen, masyarakat plural selalu kehilangan unsur demokratisnya.

Tetapi demokrasi bergantung pada jumlah. Pengaturan pengambilan keputusan demokratis lebih dari sekedar jaminan prosedural; demokrasi memberikan kriteria untuk menentukan pemenang dan yang kalah. Dan penentuan ini bergantung pada ukuran koalisi relatif. Di bagian lain, kami memperlihatkan ukuran masyarakat relatif berpengaruh pada pola instabilitas demokrasi yang dipaparkan di atas.

Konfigurasi Etnis

Konfigurasi etnis mengacu pada distribusi populasi di dalam masyarakat etnis dengan tekanan khusus pada ukuran masyarakat relatif. Walaupun secara kuantitatif, kami tidak menunjukkan secara tepat, masyarakat plural dapat dibedakan ke dalam empat kategori konfigurasi:

- Kompetisi yang seimbang
- mayoritas dominan
- minoritas dominan, dan
- fragmentasi

Kategori pertama termasuk masyarakat yang terdiri dari sejumlah kecil masyarakat etnis, biasanya dua atau tiga kelompok besar, yang tidak mempunyai keuntungan komparatif yang jelas. Oleh karena itu, pada awal kemerdekaan, tidak ada kelompok yang dapat memaksakan nilai-nilainya ke dalam politik, koalisi yang cocok dengan divisi etnis penting untuk dipimpin, dan ditingkatkannya pengamanan pada minoritas. Guyana, Belgium, Trinidad, dan Malaysia termasuk dalam kategori ini.

Karakteristik konfigurasi seimbang yang berbeda termasuk koalisi multi-etnis yang secara relatif bertahan lama, pemakaian ambiguitas dan tuntutan generasi, serta perjanjian institusionalisasi kerjasama antar etnis dalam kerangka demokratis. Akan tetapi, sebenarnya lapisan pengaturan ini mulai terlihat. Tuntutan generasi untuk konfrontasi pemerintahan dalam masalah etnis, peniupan api ketidakpercayaan etnis dan permusuhan yang disebabkan oleh ambisi. politisi yang mementingkan diri sendiri dan ketidakmampuan koalisi multietnis untuk menentang masalah-masalah itu, dapat menuntun ke arah konflik etnis. Kelompok etnis yang mempunyai kekuasaan menyesuaikan alat elektrik untuk membuatnya cocok dengan kepentingannya. Penyesuaian ini bervariasi mulai dari perombakan pemerintah lokal di Malaysia, sampai pada pembentukan pemerintahan umum di luar negeri, di Guyana, (yang tentu saja dijamin oleh partai yang memimpin untuk mempertahankan kepemimpinannya), sampai pada usaha-usaha perombakan negara kesatuan di Belgia. Konsekuensi akhirnya adalah serangkaian kondisi yang memperbolehkan kompetisi politik yang bebas dan terbuka. Jebakan-jebakan demokratis juga cepat lenyap.

Konfigurasi seimbang atas kepentingan ada karena terdapat beberapa prospek perkembangan praktik dan institusi demokratis yang besar. Prospek ini di perkuat oleh usia lanjut relatif koalisi multietnis dan oleh kelenturan keputusan dan simbol demokrasi. Tetapi ketidakmampuan koalisi untuk mengontrol kecurangan politik, kekalahan, dan konsekuensi patner koalisi untuk memperhatikan

masalah komunal, menandakan matinya kerjasama didalam komunal dan kompetisi demokratis.

Dominasi, baik itu oleh mayoritas ataupun minoritas, mengacu pada keuntungan strategis suatu masyarakat dibanding masyarakat yang lain. Di dalam kasus mayoritas, suatu masyarakat memperbanyak kompetisi politisnya hanya untuk mendapatkan jumlah besar belaka. Tindakan koalisi karakter multietnis tampaknya menjadi terminologi yang singkat. Peran masyarakat minoritas setidaknya peran demokratisnya, secara politis penting hanya di dalam peristiwa perpecahan besar didalam kelompok dominan. Lebih sering mereka dikatakan masyarakat lawan yang setia (yang tidak terlalu setia) dengan janji kekuasaan politis dari alat non-demokratis. Kami menggolongkan Ceylon, Cyprus, Mauritius, Northern Ireland (Ulster), Rwanda, dan Zanzibar ke dalam kategori ini.

Konflik di dalam konfigurasi masyarakat mayoritas dominan terjadi lebih banyak pada level fundamental masalah konstitusional daripada didalam kasus seimbang. Selanjutnya timbul perjanjian umum pada masalah pilihan konstitusional dan proteksi komunal. Peraturan mayoritas dan hak pilih secara luas memberikan jaminan yang cukup kepada beberapa masyarakat etnis. Tetapi dimana suatu masyarakat bersifat dominan di dalam suatu peraturan permainan demokratis, masyarakat yang lebih kecil kurang bersedia untuk bekerjasama. Mereka biasanya menuntut untuk representasi komunal dan bentuk-bentuk lain proteksi komunal melawan kemayoritan di pihak dominan. Oleh karena itu, karakter politik yang

bertentangan memanasifasikan diri ke dalam level konstitusional dan keputusan kebijaksanaan individu.

Dengan demikian konfigurasi masyarakat dominan dikarakteristikkan oleh jarangnja kerjasama antar etnis, politis etnis tidak moderat bagi kelompok minoritas dalam tingkat konstitusional dan kebijaksanaan, dan penindasan aktivitas politik minoritas. Kemayoritasan adalah sebab mendominasinya masyarakat dominan dan intrik elektoris adalah metodenya untuk mempertahankan dominasi. Kekerasan seringkali juga dilakukan oleh mayoritas, sebagai contoh: kekacauan Katolik dan tindakan bawah tanah di daerah kampung di wilayah perkotaan di Northern Ireland. Hasil akhirnya sama dengan yang ada didalam konfigurasi kompetisi seimbang. Simbol demokrasi tetap, substansinya terhenti pertumbuhannya.

Dalam kasus minoritas dominan, kepura-puraan demokrasi disisihkan. Masyarakat minoritas memaksakan dirinya sendiri, sebagai akibat dari pemberian keuntungan secara melimpah selama periode pra-nasional. Kasus tersebut adalah kasus di Afrika Selatan dan Rhodesia, dimana penjajah telah mentransformasikan dominasi pra-nasional ke dalam politik. Kompetisi demokratis yang tersamar tetap berlangsung hanya di dalam hal di mana perpecahan terjadi didalam masyarakat minoritas, sebagai contoh: kompetisi di asia Afrika antara orang-orang Afrika dan Inggris.

Untuk tujuan empiris, konfigurasi minoritas dominan dikarakteristikkan oleh kompetisi politis yang terbatas, tidak adanya penjaga demokratis, hilangnya

perasaan takut akan monopoli mayoritas dalam politik, dan keberhasilan politik ekstrimis yang menghapuskan segala macam alternatif moderat.

Kategori akhir, fragmentasi, termasuk masyarakat plural yang dibanjiri oleh sejumlah besar masyarakat etnis, semua masyarakat relatif kecil dan tidak ada yang dominan. Negara Congo, dengan 180 masyarakat etnis yang berbeda merupakan contoh kategori fragmentasi. Contoh-contoh yang lain termasuk di Yugoslavia, Lebanon, Nigeria, dan Sudan.

Setidaknya politik dalam masyarakat plural yang terfragmentasi menjadi kacau untuk dibicarakan. Tuntutan keahlian dalam situasi seperti itu, jarang muncul bila tidak ada sarana otoriter. Dengan demikian masyarakat plural yang terfragmentasi ditandai oleh : banyaknya kelompok kelangkaan atau tidak adanya institusi perantara, suplai kemampuan mendirikan koalisi dengan cepat, yang dibutuhkan untuk mengatur konflik politik, anarki murni dari konflik tak terstruktur sebagai hasil dari ketidakpercayaan primordial, dan pada khususnya peresmian peraturan oleh militer yang mempunyai monopoli atas kemampuan organisasi dan politik. Praktik-praktik demokratis tertutup dibawah kondisi-kondisi ini.

Kami menulis analisis teoretis politik dalam masyarakat plural dengan menggambarkan preferensi etnis. Dengan memakai kerangka utilitas seperti yang dijabarkan, kami mengasumsikan bahwa individu mempunyai preferensi yang besar dalam masalah etnis dan oleh karenanya, dikarakteristikkan oleh fungsi-fungsi

utilitas. Kami menambahi asumsi tersebut dengan serangkaian asumsi tambahan :

- Pola persetujuan (ketidakpersetujuan) antar dan ínter komunal, dan
- Tujuan dan ambisi golongan elit.

Konsekuensi dari asumsi ini memberikan serangkaian harapan teoretis yang menyusun dan menerangkan bukti-bukti. Secara khusus, kami mencatat pembentukan “*ceteris paribus*,” koalisi multietnis yang didasarkan secara luas selama periode formatif; bertahan hidupnya koalisi selama periode paska-kemerdekaan, didorong oleh pernyataan-pernyataan ambigu tentang masalah etnis divisive, dan tuntutan generasi atas masalah-masalah nasional; munculnya politisi yang ambisius (entepreneur politik) yang mencari keuntungan politis, yang memprovokasi untuk mendorong ke arah keinginan etnis; kebangkitan kembali politik dari kekalahan; hilangnya institusi perantara dan pengetnisan barang-barang publik, tidak bergunanya unsur-unsur moderat, dan akhirnya merosotnya kompetisi demokrasi akibat dari intrik elektoris dan kekerasan politis.

Kemudian kami mengobservasi bahwa proses merosotnya demokrasi seringkali bergantung pada kondisi-kondisi awal: pengalaman kolonial, peristiwa eksogen, dan konfigurasi etnis. Secara khusus, kami menekankan pada efek pentingnya distribusi populasi diantara masyarakat etnis di dalam gaya kompetisi demokratis ketika populasi didistribusikan secara lebih menyeluruh diantara sejumlah kecil kelompok etnis, politik

berlangsung terbalik secara kompetitif untuk beberapa saat. Di sisi lain, jika masyarakat tersebut diperlakukan curang untuk kepentingan masyarakat yang lain, kaum minoritas ingin merampas kekuasaan dan mempertahankan secara tidak sah, atau kaum mayoritas secara legal meraih kekuasaan, melangsungkan, dan menjamin posisi dominannya dengan memakai cara-cara manipulatif atau ekstra legal. Akhirnya, didalam kasus, proliferasi masyarakat etnis, kekacauan adalah bentuk masalah khusus yang melibatkan militer untuk mengamankan keuntungan tertentu.

Kami memberikan paradigma yang memberikan catatan dinamis perubahan sosial dalam masyarakat plural. Kami menyadari bahwa dalam beberapa hal, paradigma ini lebih ditonjolkan daripada yang lain. Kami juga melengkapi dengan representasi matematis dan reduksi yang tidak nampak, di sisi lain, kami bersandar pada intuisi yang didasari secara teoretis. Kami yakin paradigma ini dan wawasan yang membantunya memberikan pandangan “bebas yang mengejutkan” tentang dunia politik dalam masyarakat plural.

Paradigma yang ada tidak lengkap karena 2 alasan. Pertama menyangkut gap yang telah kami spesifikasi sebelumnya. Jalan untuk mendapatkan informasi tambahan dapat melalui :

1. Teori entepreneur politik, dan
2. Tindakan formal formasi preferensi

Kedua, kami mengamati bahwa kekuatan peristiwa eksogen dapat mempengaruhi politik etnis dalam

beberapa cara yang tidak dapat diprediksi. Sebagai contoh: kesuraman krisis ekonomi, agresi eksternal, bencana alam dapat mengubah bidang politik dalam masyarakat plural. Hal-hal tersebut kadang-kadang mengejutkan dan bersifat terbatas dalam ilmu pengetahuan.

Kami percaya bahwa sifat logis yang melekat dalam proses kompetisi demokratis dalam masyarakat plural adalah pemaksaan. Setidaknya, seperti apa yang telah kita ketahui di negara barat, demokrasi tidak dapat ditopang dibawah kondisi preferensi yang kuat dan bersifat penting karena hasilnya bernilai lebih dari norma-norma prosedural. Masyarakat plural dibatasi oleh preferensi warga negaranya, dan tidak memberikan lahan yang subur bagi nilai-nilai demokratis ataupun stabilitas.

Mobilisasi Protes

Protes komunal tampaknya tidak begitu diperhatikan oleh pemerintah ataupun peneliti luar sampai pemimpin gerakan politik yang menuntut untuk mewakili kepentingan kelompok mengekspresikan protes tersebut secara koheren. Keotentikan tuntutan representatif sulit dinilai, karena organisasi-organisasi yang bersaing menuntut untuk mewakili kelompoknya, karena para peneliti jarang mempunyai akses langsung ke dalam bagian silang anggota-anggota kelompok, dan karena pemerintah yang di tantang oleh gerakan berdasarkan pada minoritas biasanya mencoba untuk tidak mempercayai atau meminimalisasai tuntutan tersebut. Kenyataan menunjukkan bahwa bukti yang baik dari

kepentingan dan aksi protes sebagian besar kelompok komunal berasal dari gerakan politik mereka. Pernyataan dan strategi kelompok komunal tersebut memberikan dasar bagi pengkodean protes kelompok. Empat poin umum yang harus diingat ketika mengevaluasi semua tuntutan dan bukti tentang kepentingan kelompok komunal.

1. Kepentingan kolektif bukanlah merupakan suatu kesatuan

Terdapat kepentingan individu yang beraneka macam dan kepentingan yang terbagi-bagi didalam setiap kelompok komunal. Seseorang dapat memperkirakan bahwa terdapat berbagai macam jumlah individu setiap minoritas yang tidak diuntungkan yang akan lebih senang menerima status quo atau netral, daripada secara aktif mengejar “sebab yang ada”. Tiap-tiap kelompok memiliki kepentingan yang berbeda : mereka yang mempunyai percampuran atau menjadi perantara bagi kelompok dominan mempunyai hak istimewa perlindungan, klen dan partai politik mempunyai kepentingan lokal dan memiliki badan-badan untuk mempromosikannya. Pertanyaannya adalah apakah terdapat kepentingan umum yang tidak dapat dikurangi, atau barang-barang kolektif yang untuknya anggota kelompok akan menyimpan uang untuk kepentingan yang berkenaan dengan agamanya.

2. Organisasi politik penting untuk memformulasikan dan mengekspresikan kepentingan kolektif.

Secara analitis, kita akan memutuskan bahwa orang-orang yang telah dikalahkan dan tidak diuntungkan mempunyai kepentingan kolektif obyektif dalam otonomi dan keadilan. Secara subyektif, interview jurnalistik dan penyelidikan pendapat umum menunjukkan bahwa individu korban diskriminasi memiliki persepsi ketidakadilan dan perasaan alienasi. Tindakan kolektif yang didukung dan pengaruh politik tergantung pada penyuaran serangkaian tuntutan dan strategi tindakan yang menggerakkan kelompok orang yang substansial. Tuntutan dan strategi semacam itu hanya dapat disediakan oleh organisasi politik yang merepresentasikan dan mengejar tujuan kelompok. Struktur organisasi untuk mobilitas kelompok dapat berasal dari klan terdahulu atau hirarki agama, kadang-kadang dari asosiasi ekonomi atau partai politik konvensional tetapi didalam masyarakat modern tuntutan dan strategi itu biasanya diberikan oleh kelompok asosiasi yang baru, seperti gerakan Indian-Amerika dan organisasi kemerdekaan Kachin.

3. Ekspresi politis kepentingan kolektif lebih otentik dibandingkan yang lain.

Pada tahap awal dan tengah mobilisasi komunal menyerupai bazar politis dimana penjual menjajakan untuk bersaing intepretasi kepentingan kelompok dan taktik alternatif serta strategi untuk mempromosikannya. Para pesaing itu adalah

pemimpin tradisional, pemimpin gerakan politik yang terjadi, kaki tangan pemerintah, liberasionalis militan, pendeta fundamentalis dan banyak lagi yang lainnya. Kompetisi dan perkelahian antara partai politik diantara mereka kadang-kadang berlanjut kesegala penjuruk konflik komunal dan dapat menghancurkan akomodasi usaha. Pada prinsipnya, gerakan yang paling otentik adalah gerakan yang paling dapat mewakili kepentingan bersama kelompok. Dalam praktiknya, anggota kelompok memutuskan apa yang penting dalam kepentingan mereka dengan mengakui dan memberikan dukungan kepada pemimpin dan organisasi tertentu, Oleh karena itu, satu-satunya standar penilaian yang diberikan kepada peneliti luar adalah bahwa organisasi yang paling otentik adalah organisasi yang tuntutananya mempunyai validitas masa sekarang yang besar, organisasi seperti itulah yang terbesar dan paling tahan lama.

- 4. Kepentingan dan tujuan kelompok berubah selama terjadinya konflik komunal** konsesus pada kepentingan umum cenderung untuk meningkat selama terjadinya konflik terbuka, menurut prinsip sosiologi yang ada konflik dengan musuh eksternal meningkatkan solidaritas dalam kelompok. Akan tetapi, tidak ada tendensi yang kuat untuk gerakan komunal untuk menjadi lebih radikal atau moderat selama berlangsungnya konflik. Kita telah meneliti contoh-contoh dari kedua jenis perubahan itu. Yang jelas adalah bahwa perubahan didalam kebijaksanaan

yang dilakukan oleh gerakan dan pemerintah menyebabkan beberapa individu dan unsur untuk menetapkan lagi kepentingan dan strateginya. Konsensi pemerintah cenderung untuk memotong sebagian besar gerakan militan karena beberapa anggota kelompok memutuskan bahwa lebih merah untuk mengabaikan tuntutan daripada berjuang meneruskannya. Disisi lain, penindasan oleh pemerintah cenderung untuk mencemari gerakan moderat karena para aktivis memutuskan bahwa mereka berada dalam konflik semua atau lebih sedikit daripada tidak, pengevaluasian yang meningkatkan dukungan organisasi siap memakai alat-alat militan yang lebih untuk mengejar tujuan yang lebih radikal.

Catatan:

*) Sebuah resitasi bersumber Rabushka, Alvin and Shepsle, Kenneth A., *Politics in Plural Societies, A Theory of Democratic Instability*, Ohio, Charles E. Merrill Publishing Company.

7. Saling Ketergantungan (Interaksi Simbolik dan Pertukaran Sosial)

Dalam studi fenomenologi, ada beberapa ciri utama individu (aktor yang bertindak) yaitu :

1. Manusia adalah subjek yang pintar dan kreatif.
2. Manusia menanamkan makna dalam perilaku mereka, sehingga dibutuhkan hermeneutik.
3. Tindakan manusia di motivasi oleh makna yang diberikan kepadanya.
4. Interaksi manusia merupakan negosiasi makna antar subjek dengan kata, gerak tubuh, dan simbol lain.
5. Ada pola yang beraturan, sehingga tidak semua makna perlu dinegosiasi.
6. Ada penjelasan tentang pengalaman sosial individu atau tipikal kelompok tertentu.

Erving Goffman dalam teori Dramaturgi menyatakan bahwa kehidupan manusia adalah suatu panggung teater. Dalam pertunjukan teater selalu ditemukan aktor yang berperan, karakter lain dalam drama, dan audiens. Oleh karena itu teater sangat bertalian dengan manajemen kesan.

Pada bagian depan panggung terdapat perlengkapan ekspresif yang menjelaskan situasi, misalnya setting (pemandangan, perabotan, dekorasi, properti), tampilan (usia, jenis kelamin, ras, pakaian, status sosial), dan perilaku (kasih, akrab, dst). Bagian

belakang panggung merupakan tempat istirahat, tempat berlatih, dan tempat bersiap diri. Kehidupan manusia juga tidak beda dengan panggung teater. Manusia memiliki panggung depan dalam bentuk disiplin, moralitas, maupun nilai-nilai sosial. Namun ada juga panggung belakang kehidupan manusia berupa kepribadian yang tidak selalu terungkap dalam aktifitas sehari-hari.

Dalam pada itu para penganut teori interaksi simbolik menyatakan bahwa interaksi adalah tanda kehidupan manusia. Interaksi manusia melibatkan naluri dan simbol yang terikat pada masyarakat berupa bahasa. Bahasa adalah kenyataan objektif (*Me*) dan subjektif (*I*). Interaksi dan simbol yang saling tergantung telah membentuk sistem. Interaksi simbolik dapat dipahami sebagai kehidupan sosial dalam proses yang berubah, atau kehidupan sosial relatif tidak berubah karena ada kepribadian manusia.

Sedangkan penganut teori pertukaran sosial memandang pertukaran sebagai proses memberi dan menerima. Tindakan sosial manusia selalu didasarkan pada keuntungan yang diperoleh. Blau, misalnya, membedakan hubungan ekstrinsik yang bernuansa ekonomi, dan hubungan intrinsik yang bernuansa sosial. Resiprositas dalam pertukaran ditujukan untuk persamaan status.

Teori pertukaran muncul sebagai kritik terhadap teori sosial yang terlalu menekankan dominasi struktur belaka, serta mengabaikan peranan individu. Menurut teori pertukaran, perilaku seseorang yang menjadi warga dari institusi itulah yang membentuk dan membuat pola

dalam suatu struktur sosial. Sejarah merupakan hasil ciptaan pahlawan-pahlawan besar (aktor), sedangkan struktur sosial hanya sekedar membantu.

George C. Homans mempelopori teori pertukaran dengan mengambil alih prinsip-prinsip pemikiran psikologi perilaku dan ekonomi utilitarian. Prinsip psikologi merupakan akar interaksi sosial. Prinsip semacam ini mampu digunakan untuk menjelaskan perilaku kelompok kecil sampai perilaku kelompok besar. Apabila prinsip tersebut diteruskan, maka pada hakikatnya interaksi sosial merupakan pertukaran barang-barang yang bersifat material dan nonmaterial (seperti moral, penghargaan, simbolik, prestise dan prestasi). Pertukaran tersebut dilakukan untuk mengejar imbalan yang maksimal dan menginginkan biaya yang minimal.

Apabila seseorang memberikan sesuatu pada orang lain, sesungguhnya secara implisit ia juga mengharapkan imbalan balik. Seseorang yang menerima imbalan sebenarnya berada dalam tekanan untuk membalas dalam jumlah yang setara dengan yang diterima. Dalam interaksi yang bersifat diadik, hubungan pertukaran antara dua pihak berada dalam situasi keseimbangan yang praktis. Apabila situasi keseimbangan itu berubah pada semakin menyusutnya imbalan yang diperoleh oleh suatu pihak, maka pihak tersebut cenderung untuk mengubah perilakunya. Kalau pihak tersebut mencoba mencari alternatif pertukaran lain untuk mendapat imbalan yang lebih besar, maka akan tercipta kembali situasi yang layak atau seimbang.

Untuk perilaku yang lebih kompleks, biasanya

penciptaan pranata baru yang rumit dan kompleks dimulai pada kemampuan manusia untuk menciptakan surplus ataupun kepemimpinan yang efektif dan aturan moral yang mengatur perilaku manusia agar lebih tertib. Surplus seperti itu dinilai sebagai “investasi sosial”, sehingga dapat menciptakan pranata baru. Apabila pranata baru ini muncul, maka imbalan yang diberikan harus lebih besar bagi pendukung-pendukungnya, yang diharapkan dapat mempertahankan dan memperkembangkan pranata tersebut. Hanya dengan kelebihan surplus ini maka dapat diberikan imbalan kepada anggota, sehingga anggota dapat mengokohkan dan mengefektifkan pranata tersebut.

Perilaku seperti yang dijelaskan oleh Homans bisa dikembangkan lebih efisien dan efektif lagi, bila ada kemampuan yang ditopang oleh perkembangan sistem pertukaran yang lebih kompleks dan rumit. Apabila sistem pertukaran bisa diperinci secara khusus - bisa berlaku juga secara umum - seperti uang, maka perbedaan-perbedaan dari aktivitas manusia bisa mendapat imbalan yang seimbang. Dengan demikian orang diperlakukan secara layak dan adil. Prinsip-prinsip yang dapat dirinci secara jelas bisa diperlakukan bagi seseorang atau masyarakat umum (*generalized reinforcers*).

Homans juga mampu menjelaskan kaitan interaksi yang kompleks dengan perubahan sosial. Suatu invensi menimbulkan surplus yang dapat digunakan untuk menumbuhkan pranata baru. Dengan surplus dan pranata baru tersebut, kebutuhan individu dapat dipenuhi dan dapat dicapai keseimbangan pertukaran untuk memasuki

pranata yang lebih kompleks. Konflik yang muncul akibat adanya pranata baru dapat menimbulkan perubahan sosial.

Peter Blau mencoba menjembatani analisis sosiologi makro dan mikro. Blau tidak suka dengan pendekatan yang terlalu berat sebelah, yaitu memihak prinsip-prinsip psikologi. Interaksi kelompok tumbuh dan berkembang dengan memiliki ciri-ciri tersendiri yang berbeda dengan ciri-ciri individu. Blau juga kurang setuju dengan *grand theory* Parsons, karena teori ini sukar untuk menganalisis kenyataan yang ada dan individu tidak memiliki daya apa-apa.

Blau menjelaskan konsep “daya tarik sosial”. Hubungan pertukaran berlangsung, karena orang mengharapkan imbalan dari orang lain. Imbalan tersebut secara nyata benar-benar diterima, karena orang tersebut telah dilibatkan dan melibatkan diri dalam pertukaran. Setiap orang mempunyai kecenderungan untuk meyakinkan pada orang lain bahwa dia memiliki sesuatu yang berharga, yang dibutuhkan orang lain. Hubungan semacam ini, usaha untuk menarik orang lain, berlaku dalam suatu prinsip yang bersifat timbal balik atau resiprokal. Frekuensi pertukaran semakin lama semakin sering.

Menurut Blau, hubungan pertukaran selain memiliki fungsi integratif juga menumbuhkan perbedaan status di antara orang-orang yang mengadakan pertukaran. Perbedaan status bisa muncul, karena tidak selamanya orang yang menerima pemberian dari orang lain itu mampu memberikan imbalan yang seimbang terhadap

imbalan yang diterima. Sejauh orang itu mampu memberikan imbalan seimbang dalam hubungan resiprokal, maka posisi superior itu biasa. Ini dipandang oleh Blau sebagai pengokohan status secara lebih nyata.

Hubungan pertukaran dapat berubah menjadi hubungan kekuasaan. Seseorang memberi pelayanan kepada orang lain, dan orang lain menerima pelayanan, adalah mutlak atau tak bisa ditawar lagi. Tanpa hubungan pertukaran tersebut manusia tidak dapat hidup. Apabila salah satu pihak mampu menawarkan pelayanan yang mutlak, maka ada pihak-pihak tertentu yang lebih menonjol. Orang yang membutuhkan tidak dapat memperoleh sesuatu secara paksa, melainkan harus mengikuti prosedur tertentu. Terjadi perbedaan hubungan pertukaran, apabila individu yang menerima imbalan tidak bisa menentukan kapan imbalan dapat dikembalikan. Imbalan tidak lagi ditentukan oleh si penerima, tetapi ditentukan dengan paksaan oleh si pemberi pertamakali. Si penerima terpaksa harus tunduk pada situasi eksploitatif. Dengan demikian terjadilah perubahan hubungan pertukaran ke hubungan kekuasaan.

Dalam suatu hubungan kekuasaan tentu saja mengandung prinsip-prinsip *fair exchange* atau hubungan yang adil, yang dirasakan oleh pihak yang berkuasa. Hubungan yang semakin berkembang antara pihak yang berkuasa dengan pihak yang tidak berkuasa menimbulkan perubahan primer maupun sekunder. Mengantisipasi perubahan tersebut diperlukan konsep persetujuan sosial (*social proval*). Apabila orang setuju atau sepakat menerima hubungan tersebut, maka terciptalah legitimasi.

Sebaliknya apabila hubungan kekuasaan dirasakan tidak adil, terjadi kondisi penolakan sosial (*social disapproval*) yang menimbulkan situasi oposisi. Situasi seperti ini menjadi benih terjadinya perubahan sosial.

Proposisi-proposisi mengenai bentuk-bentuk perilaku sosial menurut Homans dan Blau ialah :

1. Dalam segala hal yang dilakukan oleh seseorang, semakin sering sesuatu tindakan mendapatkan ganjaran (mendapatkan respon yang positif dari orang lain), maka akan semakin sering pula tindakan dilakukan oleh orang yang bersangkutan;
2. Jika suatu stimulus tertentu telah merupakan kondisi di mana tindakan seseorang mendapatkan ganjaran, maka semakin serupa stimulus yang ada dengan stimulus tersebut akan semakin besar kemungkinannya bagi orang itu untuk mengulang tindakannya seperti yang ia lakukan pada waktu yang lalu;
3. Semakin bermanfaat hasil tindakan seseorang bagi dirinya, maka akan semakin besar kemungkinan tindakan tersebut diulangi. Proposisi rasionalitas menyatakan bahwa di dalam memilih suatu tindakan yang mungkin dilaksanakan, maka seseorang akan memilih tindakan yang paling menguntungkan, dilihat dari segi waktu, nilai hasil, dan perkembangan berdasar berbagai kemungkinan pencapaian hasil;
4. Semakin sering seseorang menerima ganjaran yang istimewa, maka ganjaran tersebut akan menjadi kurang bermakna;
5. Jika seseorang tidak menerima ganjaran seperti yang

ia inginkan, atau mendapat hukuman yang tidak ia harapkan, ia akan menjadi marah dan akan semakin besar kemungkinan bagi orang tersebut untuk mengadakan perlawanan atau menentang, dan hasil dari perilaku semacam ini akan menjadi lebih berharga bagi dirinya;

6. Bila tindakan seseorang mendatangkan ganjaran seperti yang ia harapkan bahkan berlebihan, atau tindakan tersebut tidak mendatangkan hukuman seperti keinginannya, maka ia akan merasa senang, dan akan semakin besar kemungkinannya bagi orang tersebut untuk menunjukkan perilaku persetujuan terhadap perilaku yang dilakukan, dan hasil perilaku semacam ini akan menjadi semakin berharga bagi dirinya.

8. Sistem Sosial Budaya Indonesia

Nasikun dalam buku Sistem Sosial Indonesia menyatakan bahwa pluralitas (bhineka) merupakan benih konflik, sedangkan tunggal ika merupakan perekat integrasi. Keunikan dari buku Nasikun ialah pemanfaatan sintesis teori fungsional Parsons dan teori konflik Dahrendorf untuk menganalisis sistem sosial Indonesia.

Struktur majemuk masyarakat Indonesia telah banyak diulas oleh beberapa ilmuwan sosial. Misalnya, Furnivall, menunjukkan pemerintah kolonial Belanda yang membagi masyarakat Indonesia pada tiga lapisan yaitu masyarakat kulit putih (Belanda), masyarakat kulit kuning (Tionghoa), dan masyarakat kulit sawo matang (Indonesia). Clifford Geertz membagi masyarakat dalam kategori santri (taat beribadah), abangan (kurang taat beribadah), dan priyayi (analog dengan birokrat). Van de Berghe menyebutkan bahwa struktur majemuk masyarakat berdampak pada tumbuhnya pelbagai subkultur, kurangnya konsensus, dan tingginya koersif. Di sisi lain, kelompok Islam Indonesia juga dibedakan antara Modernis (Muhammadiyah), Tradisionalis (Nahdlatul Ulama), dan Nominal (Abangan).

Nasikun secara kritis memandang struktur kepartaian merupakan perwujudan struktur sosial di Indonesia. Struktur sosial masyarakat Indonesia yang bisa dibedakan menurut agama yang dianut (Islam Santri, Islam Non Santri, Kristen, dst); desa dan kota; maupun Jawa dan Luar Jawa. Struktur sosial tersebut merupakan

potensi laten untuk melahirkan konflik sosial-kultural yang bersifat ideologis. Konflik ideologis ini pada saatnya akan muncul sebagai konflik politik dalam bentuk persaingan dan pertentangan di antara partai-partai politik. Hal ini tercermin sejak Pemilu tahun 1955 dengan lahirnya Masyumi, NU, PNI, PKI, PSI, Partai Katolik, Partai Kristen Indonesia, dst; sampai Pemilu tahun 1999 dengan lahirnya PDIP, Partai Golkar, PAN, PKB, dst.

Lebih lanjut Nasikun menyatakan bahwa struktur masyarakat Indonesia juga mendukung proses integrasi nasional. Pluralitas masyarakat bisa mendukung integrasi horizontal, sedangkan stratifikasi masyarakat bisa mendukung integrasi vertikal. Keduanya lewat proses *cross cutting affiliation* yang akan melahirkan *cross cutting loyalites*.

Beberapa indikasi intensitas konflik bisa dilihat dalam bentuk demonstrasi, kerusuhan, serangan bersenjata, dan jumlah kematian akibat kekerasan. Ada tiga sanksi yang dilakukan pemerintah untuk meredam konflik yaitu lewat sensor, pembatasan partisipasi politik, dan pengawasan ketat.

Robert Lawang dalam buku Sistem Sosial Indonesia I mengkritik Nasikun sebagai berikut :

1. Masyarakat Indonesia sebagai kesatuan politik dan hukum, berbeda dengan masyarakat di Indonesia sebagai subkultur.
2. Contoh yang diberikan tentang partai politik di Indonesia jelas lebih condong ke arah konflik. Seandainya contoh yang diberikan tentang pendidikan, maka mungkin lebih condong ke integrasi.

9. Studi Kasus : Sistem Sosial Budaya Lokal dan Kegiatan Sosial Perusahaan

Di dunia yang dinamis dan saling terhubung saat ini, bisnis beroperasi dalam jalinan kompleks sistem sosial budaya. Sistem ini, yang mencakup nilai-nilai, norma, kepercayaan, dan praktik, membentuk tatanan sosial dan memengaruhi perilaku individu dan kolektif. Memahami sistem ini sangat penting bagi bisnis untuk menavigasi lanskap sosial secara efektif dan terlibat dalam aktivitas korporat yang bermakna.

Pemahaman mendalam tentang sistem sosial budaya memungkinkan bisnis untuk menyesuaikan strategi dan operasinya agar selaras dengan norma, nilai, dan harapan yang berlaku di komunitas yang mereka layani. Keselarasan ini menumbuhkan kepercayaan, membangun hubungan baik, dan meningkatkan legitimasi tindakan korporat. Dengan menghormati dan memasukkan kebiasaan, tradisi, dan kepercayaan lokal, bisnis dapat menunjukkan komitmen mereka terhadap tanggung jawab sosial dan berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan.

Selain itu, memahami sistem sosial budaya memberdayakan bisnis untuk mengidentifikasi dan menangani masalah sosial yang memengaruhi pemangku kepentingan mereka. Dengan terlibat dengan komunitas, bisnis dapat memperoleh wawasan tentang tantangan dan peluang lokal, memungkinkan mereka untuk

mengembangkan inisiatif tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang ditargetkan untuk mengatasi kebutuhan sosial yang mendesak. Inisiatif ini, mulai dari program pendidikan hingga upaya konservasi lingkungan, dapat menciptakan nilai bersama, tidak hanya untuk bisnis tetapi juga untuk komunitas yang mereka sentuh.

Sistem sosial budaya dan kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR) saling terkait erat, dan membentuk dinamika serta hasil satu sama lain. CSR, sebagai pendekatan bisnis strategis yang bertujuan menciptakan dampak positif sosial, tidak dapat diterapkan secara efektif tanpa pemahaman mendalam mengenai konteks sosial budaya tempat perusahaan beroperasi (Vlahović, 2010). Sebaliknya, sistem sosial budaya dapat secara signifikan dipengaruhi oleh inisiatif CSR yang dijalankan oleh perusahaan.

Perusahaan yang terlibat dalam kegiatan CSR yang bermakna menunjukkan komitmen mereka kepada masyarakat yang mereka layani, sehingga terjalin kepercayaan dan niat baik. Dengan menyelaraskan upaya CSR mereka dengan nilai-nilai, norma, dan kebutuhan konteks sosial budaya lokal, perusahaan dapat menciptakan nilai bersama, tidak hanya untuk diri mereka sendiri tetapi juga untuk komunitas yang mereka implikasi.

Kegiatan CSR juga dapat berfungsi sebagai katalisator perubahan sosial, mendorong transformasi positif dalam sistem sosial budaya. Dengan mengatasi masalah sosial, mendukung pelestarian budaya, dan

memberdayakan masyarakat lokal, perusahaan dapat berkontribusi pada masyarakat yang lebih adil, setara, dan berkelanjutan.

Pada intinya, hubungan antara sistem sosial budaya dan CSR adalah jalan dua arah. Perusahaan yang menerima koneksi ini tidak hanya dapat meningkatkan reputasi dan kepuasan pemangku kepentingan mereka, tetapi juga berkontribusi pada masyarakat yang lebih harmonis dan berkembang.

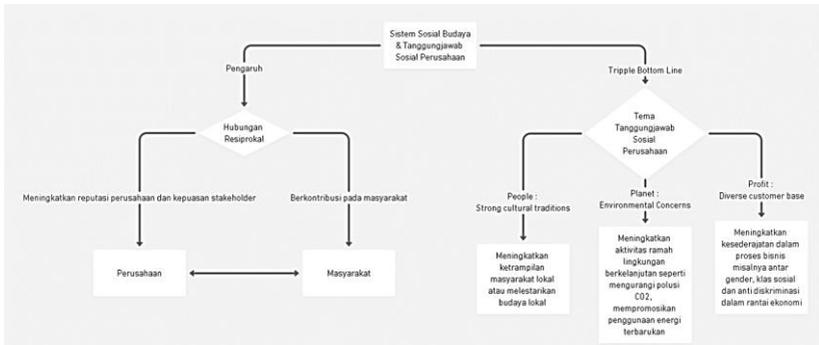
Berikut adalah beberapa contoh spesifik bagaimana sistem sosial budaya dan kegiatan CSR terkait:

1. Perusahaan yang beroperasi di komunitas dengan tradisi budaya yang kuat dapat memasukkan tradisi tersebut ke dalam inisiatif CSR mereka, seperti mendukung pengrajin lokal atau melestarikan situs warisan budaya.
2. Perusahaan yang bekerja di wilayah dengan masalah lingkungan dapat memfokuskan upaya CSR mereka pada praktik keberlanjutan, seperti mengurangi jejak karbon atau mempromosikan energi terbarukan.
3. Perusahaan yang menargetkan basis pelanggan yang beragam dapat memprioritaskan inisiatif CSR yang mempromosikan inklusi dan kesetaraan, seperti mendukung program keragaman dan anti-diskriminasi.

Dengan memahami dan menyelaraskan dengan sistem sosial budaya, perusahaan dapat terlibat dalam kegiatan CSR yang berdampak dan berkelanjutan, menciptakan warisan positif bagi diri mereka sendiri dan

komunitas yang mereka layani (Ricotti, 2003; Rishi & Moghe, 2013). Hal ini akan mengakibatkan kegiatan CSR menjadi berkelanjutan seiring dengan kehidupan masyarakat yang terus berjalan.

Dalam sebuah diagram, penjelasan di atas dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar Hubungan Resiprokal Sistem Sosial Budaya dan CSR

Sumber : olahan penulis

Pada bab 9 ini akan dibahas beberapa contoh implementasi dari pemahaman akan sistem sosial budaya pada tahap riset, perencanaan, implementasi dan evaluasi dari kegiatan CSR.

a. Kasus Pertama

CSR Kampanye Bijak Menggunakan Gadget (2022)

Mitra : LSM Hope Surabaya

Komunitas Sasaran : Anak-anak perumahan Rusun Sombo

Kegiatan Bijak Menggunakan *Gadget* (2022)

Kegiatan Bijak Menggunakan *Gadget* mampu menjawab masalah dan realita dalam Rusunawa Sombo, yaitu keinginan anak-anak belajar secara on-site dan tingginya frekuensi penggunaan *gadget*. Setelah melakukan wawancara kepada orang tua di Rusunawa Sombo, tim pelaksana mendapati bahwa anak-anak Rusunawa Sombo memiliki antusiasme yang tinggi terhadap pendidikan. Namun dengan munculnya Covid-19 yang menyebabkan pembelajaran secara daring, maka anak-anak menunjukkan penurunan minat terhadap belajar. Selain itu, seiring dengan pembelajaran daring, frekuensi penggunaan *gadget* juga meningkat signifikan. Oleh karena itu, Bijak Menggunakan *Gadget* diadakan untuk menjawab masalah tersebut

Melalui kegiatan Bijak Menggunakan *Gadget*, mahasiswa Ilmu Komunikasi bekerja sama dengan *Hope Worldwide* ingin mengedukasi anak-anak Rusunawa Sombo mengenai pentingnya bijak dalam menggunakan *gadget* mereka. Implementasi dari kegiatan ini adalah memberikan Seminar dan Workshop kepada anak-anak Rusunawa Sombo mengenai manajemen waktu, belajar disiplin, desain grafis, dan fotografi. Serangkaian acara tersebut telah sesuai dengan tema yang diambil, yaitu *Controlling Gadget not Controlled by Gadget*. Seluruh kegiatan berjalan dengan lancar, namun terdapat sedikit pergantian materi pada minggu kedua dengan materi “pornografi” menjadi

“Belajar Disiplin”. Pergantian materi ini terjadi sebagai hasil diskusi dengan mitra karena situasi, kondisi, dan kepercayaan yang dianut dalam Rusunawa Sombo.

Sasaran kegiatan ini yaitu anak-anak Rusunawa Sombo yang sedang menempuh pendidikan di jenjang Sekolah Dasar (SD) kelas 4-6. Pertemuan pertama kegiatan Bijak Menggunakan *Gadget* mengajarkan tentang “Manajemen Waktu” disampaikan oleh tim pelaksana pada 16 April 2022. Pertemuan kedua mengajarkan tentang Belajar Disiplin disampaikan oleh tim pelaksana pada 23 April 2022. Pertemuan ketiga mengajarkan tentang “Desain Grafis” disampaikan oleh tim pelaksana pada 14 Mei 2022. Pertemuan terakhir mengajarkan tentang “Fotografi” disampaikan oleh tim pelaksana pada 21 Mei 2022. Komunikasi sejak awal yang dijalin oleh para mahasiswa, LSM kepada masyarakat maupun anak rusunawa berjalan lancar berkat persiapan yang matang. Kegiatan ini didanai oleh pihak Mitra yang terkait. Bagi Mitra, hal ini menjadi bagian dari mempertahankan reputasi mereka sebagai sebuah lembaga sosial maupun pendidikan yang memiliki tugas untuk meningkatkan kualitas masyarakat (*capacity building*).

Pada dasarnya masyarakat penghuni rusunawa memiliki keinginan agar anak-anak memiliki hidup yang lebih baik daripada orangtuanya. Rusun Sombo adalah sebuah kompleks rumah susun sederhana sewa (rusunawa) yang terletak di Kelurahan Simolawang, Kecamatan Simokerto, Kota Surabaya, Jawa Timur.

Rusun ini dibangun oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan diresmikan pada tahun 2021.

Rusun Sombo terdiri dari 5 tower dengan total 213 unit hunian. Setiap unit hunian memiliki luas 36 meter persegi dan dilengkapi dengan 2 kamar tidur, 1 kamar mandi, ruang tamu, dapur, dan balkon. Rusun ini juga dilengkapi dengan berbagai fasilitas umum seperti masjid, musala, taman bermain, lapangan olahraga, dan pusat kesehatan.

Rusun Sombo diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang memenuhi kriteria yang telah ditentukan oleh pemerintah. Sewa rusun ini sangat terjangkau, yaitu sekitar Rp 300.000 per bulan.

Rusun tersebut terdiri dari Blok A hingga Blok K dengan rata-rata penduduk per blok berkisar 20 kepala keluarga. Rata-rata pekerjaan kepala keluarga mereka adalah tukang becak dan sopir sehingga termasuk ke dalam masyarakat dengan ekonomi menengah ke bawah. Penghuni dari rusun ini kebanyakan merupakan berasal dari daerah Madura. Dikutip dari penelitian Aji (2004), Suku Madura, salah satu suku bangsa di Indonesia, memiliki sistem adat dan budaya yang unik dan khas, membedakan mereka dari suku lain. Karakter temperamental dan aksen bicara yang khas menjadi ciri khas yang mudah dikenali. Selain itu, orang Madura memiliki ciri khas "Bapa'Babu' Guru Rato" yang artinya mereka sangat menghargai dan mensyukuri orang tua.

Masyarakat Madura dikenal memiliki etos kerja yang tinggi dan jiwa petualang. Hal ini mendorong banyak

orang Madura untuk merantau ke luar daerah, mencari penghidupan yang lebih baik. Semangat pantang menyerah dan kegigihan mereka dalam bekerja patut diacungi jempol. Orang Madura yang menghuni rusunawa ini adalah bauran dari orang kelahiran Madura yang merantau ke Surabaya atau orang Madura yang lahir serta besar di Surabaya.

Dalam rusun tersebut terdapat kegiatan rutin gotong royong setiap 1 bulan sekali guna mempererat tali persaudaraan antar penghuni rusun. Selain gotong royong, juga terdapat arisan rutin yang diadakan oleh masing-masing RT, karang taruna, serta pengajian. Salah satu sumber daya manusia yang berpotensi dalam rusun tersebut adalah anak-anak. Jumlah anak-anak dalam rusun sombo berkisar 300 anak yang tersebar dalam seluruh blok. Tak heran bila anak-anak tersebut kurang mendapat fasilitas belajar yang kurang memadai di lokasi.

Terdapat 1 SD terakreditasi B di kawan rusun tersebut. Bagi siswa SMP harus berjalan keluar kawasan rusun untuk sampai ke sekolah. Namun demikian, anak-anak masih memiliki antusias yang tinggi terhadap pendidikan.

Situasi rusun Sombo yang memang serba berkekurangan, semakin parah pada masa pandemi. Menurut pengakuan orang tua, ketika sekolah online pun biasanya anak-anak tidak memperhatikan dengan baik. Mereka seakan tidak fokus karena suasana dan kondisi yang jauh berbeda dengan sekolah tatap muka sehingga juga mempengaruhi nilai mereka yang turun karena kurang memahami materi pembelajaran. Namun ada

banyak peluang yang bisa terbuka bagi komunitas ini dimana lingkungan mereka sangat didukung oleh para orang tua ketika melakukan proses pembelajaran dalam bentuk apapun. Mengingat dulu ketika sebelum pandemi ada kegiatan *Saturday Academy*, anak-anak sangat antusias mengikuti karena sangat bermanfaat bagi proses belajar mereka di sekolah. Kegiatan pembelajaran dari luar sangat mereka minati contohnya *Saturday Academy*. Anak-anak yang mengikuti *Saturday Academy* memiliki semangat untuk belajar. Selain itu, balai RW yang cukup besar dapat menampung anak-anak yang mengikuti pelajaran secara onsite. Kemudian, peralatan yang menunjang dalam pembelajaran seperti *LCD*, *speaker*, dan *mic*. Namun komunitas ini memiliki beberapa ancaman yaitu kondisi pandemi, sehingga untuk sementara kegiatan belajar mengajar dilakukan secara online. Contohnya *Saturday Academy* di balai RW ditiadakan. Pembelajaran online membuat anak-anak menjadi malas belajar. Selain itu, ancaman bahaya penggunaan gadget yang terus menerus. Dari analisis SWOT yang telah dilakukan, ditemukan peluang adanya pihak-pihak yang peduli pada masyarakat semacam ini, antara lain Yayasan Hope. *HOPE Worldwide Indonesia* merupakan organisasi sosial yang memiliki visi untuk mensejahterakan kehidupan keluarga yang kurang mampu di Indonesia. *Hope worldwide Indonesia* didirikan pada tahun 1994 dengan misi untuk mengasihi masyarakat yang kesulitan secara ekonomi dan membantu masyarakat yang sedang terkena bencana. Organisasi ini teregistrasi dibawah Kementrian Hukum

Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sejak tahun 1998, dan organisasi ini merupakan bagian dari *Hope Worldwide* yang merupakan organisasi internasional dan NGO yang berbasis di Atlanta, Georgia (USA). Komunitas *Hope Worldwide Indonesia* sendiri ini berbasis di beberapa kota lain selain Surabaya, namun tim pelaksana bekerja sama dengan organisasi *Hope Worldwide Indonesia* yang berbasis di Surabaya. Organisasi ini memiliki beberapa program yang aktif dilakukan sampai sekarang, yaitu program “*Saturday Academy*”, dan juga program “Terampil Digital” tidak hanya itu, mereka juga aktif melakukan event-event lain seperti event “*Skip a Meal Challenge*” dimana mereka melakukan tantangan untuk *Skip* salah satu makanan sehari-hari selama 30 hari dan menyumbangkan *cost* dari makanan tersebut agar dialokasikan untuk membantu orang-orang yang kurang mampu. *Hope Indonesia* yang bercabang di Surabaya sendiri bekerjasama dengan beberapa komunitas seperti Rusun Sombo, Rusun Gubeng, dsb, sebagai target komunitas yang ingin mereka bantu melalui program-program mereka.

Kegiatan ini menjadi angin segar bagi anak-anak Rusunawa Sombo, membuka peluang untuk meraih masa depan yang lebih cerah. Dengan pendidikan karakter dan akses terhadap gizi, mereka diharapkan dapat tumbuh menjadi individu yang tangguh, berkarakter, dan memiliki harapan untuk hidup yang lebih baik.

Dari kasus ini dapat dipelajari bahwa pemahaman tentang sistem sosial dan budaya lokal sangat membantu kelancaran komunikasi antara sebuah organisasi dengan

komunitas yang dituju. Memahami bentuk kesopanan, sifat dan budaya komunitas memberikan landasan program kerja yang lebih bersahaja, egaliter, terus terang dan mengena sasaran bagi anak-anak di rusunawa Sombo untuk lebih giat belajar dan memanfaatkan gawai secara bijak.

b. Kasus Kedua

CSR Dongeng Petra Bersama Yayasan Edukasih (2022)

Mitra : Yayasan Edukasih

Komunitas Sasaran : Anak-anak Putat Jaya Gang Lebar
Surabaya

Dongeng Petra (2022)

Hari 1

Pada jam 10.00 WIB, tim pelaksana menjemput anak-anak perempuan usia Sekolah Dasar (SD) untuk datang ke Yayasan EduKasih. Setelah semuanya anak-anak berkumpul, tim pelaksana memulai kegiatan dengan lagu dan perkenalan, dilanjutkan dengan dongeng, lalu ice breaking, dan yang terakhir adalah kegiatan crafting.

Walaupun, awalnya tim pelaksana hanya bertugas untuk mendongeng, namun tim pelaksana tetap membantu teman-teman Yayasan EduKasih untuk membimbing setiap anak dari awal hingga akhir acara. Setelah selesai *crafting*, tim pelaksana melakukan dokumentasi bersama dan memberikan snack kepada anak-anak, lalu kemudian mengantarkan anak-anak

tersebut pulang ke rumah masing-masing. Kelas pertama anak-anak perempuan usia Sekolah Dasar (SD) selesai pada jam 12.00 WIB.

Sesi kelas kedua dilanjutkan untuk anak-anak laki-laki usia Sekolah Dasar (SD) pada jam 13.00 WIB. Berbeda dengan kelas perempuan di pagi hari, anak-anak laki-laki tidak tim pelaksana jemput karena mereka langsung datang sendiri ke Yayasan EduKasih. Kegiatan pun dilaksanakan dengan rundown kegiatan yang sama dengan kelas anak-anak perempuan Sekolah Dasar (SD) di pagi hari tadi. Perbedaan ada dalam pendekatan kepada anak-anak perempuan dan laki-laki. Anak laki-laki lebih aktif dan suka bergerak, sehingga tim pelaksana sebagai pengajar menyesuaikan dengan cara mengajak mereka aktif berinteraksi dengan kita saat dongeng maupun ice breaking.

Setelah kedua kelas selesai, tim pelaksana melakukan evaluasi singkat bersama dengan teman-teman Yayasan EduKasih. Evaluasi yang didapatkan dihari pertama adalah masih ada sedikit rasa canggung yang terlihat dari kita paniiia-panitia DORAYAKI (Dongeng Petra bersama Yayasan EduKasih) karena masih baru mengenal anak-anak tersebut.

Hari 2

Pada jam 10.00 WIB, tim pelaksana mulai menjemput anak-anak perempuan dan laki-laki usia Taman Kanak-Kanak (TK) untuk datang ke Yayasan EduKasih. Setelah semuanya anak-anak berkumpul, tim

pelaksana memulai kegiatan dengan lagu, dilanjutkan dengan dongeng, lalu *ice breaking*, dan yang terakhir adalah kegiatan *crafting*.

Saat membimbing kegiatan *crafting*, anak-anak usia Taman Kanak-Kanak (TK) lebih harus didampingi karena banyak yang belum fasih menulis, membaca serta menempel. Setelah itu tim pelaksana melakukan dokumentasi bersama dan memberikan *snack* kepada anak-anak, lalu kemudian mengantarkan anak-anak tersebut pulang ke rumah masing-masing pada jam 12.00 WIB.

Diakhir, melakukan evaluasi singkat bersama dengan teman-teman Yayasan EduKasih. Evaluasi yang didapatkan dihari kedua adalah terdapat peningkatan positif dari tim pelaksana para panitia DORAYAKI (Dongeng Petra bersama Yayasan EduKasih) saat mendongeng ataupun *ice breaking*, sehingga kegiatan berjalan dengan lancar.

Hari 3 dan 4

Pada jam 10.00 WIB, tim pelaksana mulai menjemput anak-anak perempuan usia Sekolah Dasar (SD) untuk datang ke Yayasan EduKasih. Setelah semuanya anak-anak berkumpul, tim pelaksana memulai kegiatan dengan lagu, *ice breaking*, dilanjutkan dengan dongeng, dan yang terakhir adalah kegiatan *crafting*.

Setelah selesai *crafting*, tim pelaksana melakukan dokumentasi bersama dan memberikan *souvenir* buku baca kepada anak-anak, sebagai tanda

perpisahan dari tim pelaksana kepada anak-anak perempuan usia Sekolah Dasar (SD). Kemudian mengantarkan anak-anak tersebut pulang ke rumah masing-masing di pada jam 12.00 WIB.

Sesi kelas kedua dilanjutkan untuk anak-anak laki-laki usia Sekolah Dasar (SD) pada jam 13.00 WIB. Kegiatan pun dilaksanakan dengan rundown kegiatan yang sama dengan kelas anak-anak perempuan Sekolah Dasar (SD) di pagi hari tadi. Tim pelaksana juga memberikan souvenir kepada anak-anak laki-laki usia Sekolah Dasar (SD).

Setelah kedua kelas selesai, tim pelaksana melakukan evaluasi singkat bersama dengan teman-teman Yayasan EduKasih. Evaluasi yang didapatkan di hari ketiga sangat positif, tim pelaksana mendapat pujian dari teman-teman Yayasan EduKasih karena berhasil membawa dongeng yang panjang dengan menarik dan interaktif.

Walaupun terkesan kegiatan sederhana tapi tim pelaksana bersyukur atas apa yang telah terjadi dan melihat respon dari anak-anak yang positif. Tim pelaksana melihat anak-anak yang cerita, mau mendengarkan dongeng, aktif menjawab dan bertanya, perlahan-lahan belajar menulis atau menggunting atau membaca. Ditambah, melihat anak-anak yang sedih saat mengetahui kegiatan DORAYAKI (Dongeng Petra bersama Yayasan EduKasih) harus berakhir. Mereka banyak mengucapkan salam perpisahan, bercerita tentang rasa senangnya mereka bertemu tim pelaksana dan menagih janji agar tim pelaksana dapat kembali lagi

ke Yayasan EduKasih. Semua itu adalah hal yang diluar dari ekspektasi tim pelaksana dalam melaksanakan kegiatan ini. Dari sinilah membuat tim pelaksana termotivasi dan sadar akan berharganya sebuah Kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan bagi masyarakat.

Yayasan EduKasih sebagai mitra tim pelaksana juga sangat luarbiasa dalam kebesaran hati menerima tim pelaksana panita-panitia DORAYAKI (Dongeng Petra bersama Yayasan EduKasih). Besar harapan tim pelaksana agar kedepannya Yayasan EduKasih yang memiliki visi misi mulai dan positif dapat berkembang lebih besar demi kemajuan anak-anak Indonesia. Tim pelaksana juga sangat menerima dan senang hati jika ada kesempatan dilain waktu untuk bekerjasama dengan Yayasan EduKasih. Melihat kemampuan anak-anak daerah Eks Lokalisasi Dolly, tim pelaksana menyarankan agar Yayasan EduKasih dapat mengembangkan bakat-bakat mereka melalui lomba / mengikuti pameran atau kegiatan serupa.

Kendala yang tim pelaksana temui adalah dalam mengontrol anak-anak. Ada anak yang agak susah diajak berinteraksi dengan teman-temannya, ada anak yang mempunyai tantrum, dan ada juga anak yang agak kasar saat bermain dengan temannya. Namun, semua ini mengajarkan untuk tetap bersabar dan membimbing anak-anak dengan lembut.

Pendidikan memiliki peranan penting dalam menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Pendidikan dapat diperoleh dari kegiatan membaca atau menulis yang disebut juga literasi. Menurut *The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization* (UNESCO), literasi adalah seperangkat keterampilan nyata, terutama keterampilan dalam membaca dan menulis yang terlepas dari konteks di mana keterampilan itu diperoleh, siapa yang memperoleh, dan bagaimana cara memperolehnya. Indonesia adalah negara ke 62 dari 70 negara dalam tingkat literasi menurut survei *Organization for Economic Co-operation and Development* (OECD) pada tahun 2019. Hal ini menunjukkan rendahnya tingkat literasi di Indonesia dan menjadi sebuah masalah yang nyata, dimana Indonesia perlu mawas diri terhadap faktor utama rendahnya literasi.

Terdapat tiga masalah utama dalam budaya literasi di Indonesia, yaitu alokasi waktu, bahan bacaan dan sarana yang terkait satu sama lain. Memenuhi standar membaca dari UNESCO yaitu 4-6 jam perhari merupakan tantangan besar. Sebab di Indonesia belum beranjak dari budaya lisan. Kurangnya bahan bacaan juga didapati di Indonesia karena sulitnya mencari dan memproduksi buku-buku pengetahuan. Ketersediaan sarana yang mendukung juga diperlukan, seperti perpustakaan umum atau fasilitas membaca lainnya baik offline maupun online.

Meningkatkan budaya literasi di masyarakat perlu ditanamkan dan dikenalkan sejak usia dini, terlebih generasi muda adalah harapan sebagai penerus bangsa Indonesia. Budaya literasi harus bisa dikenalkan dengan

cara yang menarik serta bermanfaat, dengan begitu generasi muda tidak merasa jenuh dan bosan dengan kegiatan literasi. Semakin dini pengenalan ke anak tentang literasi, semakin membuat anak terbiasa akan kegiatan literasi dan menciptakan budaya atau kebiasaan literasi pada anak tersebut. Lingkungan juga memiliki andil penting dalam menciptakan budaya literasi di tengah anak-anak. Ketidakmampuan lingkungan sekitar mendukung terciptanya budaya literasi karena kurangnya sarana dan prasarana, dapat menjadi masalah besar jika terus diabaikan.

Menjadi fokus perhatian dalam proposal ini adalah lingkungan kawasan daerah Eks Lokalisasi Dolly di Surabaya. Kawasan tersebut merupakan tempat dari pelaksanaan bisnis prostitusi terbesar se Asia Tenggara. Walaupun saat ini kawasan daerah Eks Lokalisasi Dolly sudah ditutup sejak tahun 2014 oleh Wali Kota saat itu, yaitu Tri Rismaharini, namun tetap masih menyisakan dampak-dampak dan budaya dari kegiatan prostitusi tersebut. Hampir sebagian besar warga yang berada di kawasan tersebut pernah atau bahkan masih bekerja dalam bisnis prostitusi. Tidak sedikit kisah pilu dari anak-anak di kawasan daerah Eks Lokalisasi Dolly, yang sejak kecil sudah terbiasa hidup berdekatan dengan bisnis prostitusi yang mengakibatkan kurang perhatian orang tua terhadap kebutuhan perkembangan anak-anaknya. Menurut data dari Yayasan *Crisis Center Cahaya Mentari* (CCCM), terdapat 397 kasus kekerasan terhadap anak di kawasan daerah Eks Lokalisasi Dolly dari tahun 2006 hingga 2014. Problema ini juga memunculkan kenyataan

dimana kurangnya lingkungan yang mendukung anak untuk berkembang khususnya dalam pendidikan yang menjadi bekal penting untuk masa depan anak. Harus ada kesadaran untuk menciptakan lingkungan positif yang menjawab kebutuhan anak-anak usia dini, Taman Kanak-Kanak (TK) dan Sekolah Dasar (SD).

Gang Dolly adalah sebuah tipe masyarakat yang unik dari sisi sistem sosial budaya, karena berbeda dengan masyarakat sekitarnya yang kurang menyetujui aktivitas malam kampung ini. Gang Dolly dibangun oleh berbagai macam kepentingan dalam kurun waktu yang lama. Telah terdapat pembagian-pembagian fungsi dalam kesehariannya dan tiap fungsi ini selalu bekerjasama untuk menjaga situasi yang stabil sebagai tempat prostitusi. Kebiasaan ketergantungan antara fungsi ini, misalnya mucikari, PSK, penjaga parker, pemilik warung makanan, dan sebagainya. Relasi dan aktivitas yang telah menjadi kebiasaan, seketika harus berubah ketika Dolly dibersihkan dari prostitusi. Prostitusi memang sudah tidak ada lagi, namun perilaku yang sudah melekat pada warga yang tinggal di sana sulit dihilangkan. Misalnya melakukan "*cat calling*" pada para wanita yang melalui gang di daerah eks Dolly. Hal ini yang penting diketahui ketika perencanaan CSR di sana. Masalah berpakaian, cara pendekatan, cara berkomunikasi, etika bertindak, menjaga diri dan merancang jenis kegiatan maupun aktivitas, adalah hal-hal yang perlu diperhatikan dalam perancangan kegiatan. Adapun memahami pihak-pihak yang menjadi penatua wilayah penting, seperti siapa ketua RT/RW, orang-orang utama yang disegani di wilayah

tersebut, membantu jalan kegiatan menjadi lancar dan bermakna bagi warga.

Dongeng Petra bersama Yayasan EduKasih (DORAYAKI) hadir dengan tujuan memberikan wadah dan fasilitas untuk anak-anak di kawasan daerah Eks Lokalisasi Dolly dalam segi literasi pendidikan. Dongeng adalah salah satu sarana yang menarik untuk memperkenalkan anak-anak tentang budaya membaca secara kreatif dan tidak membosankan, khususnya untuk anak-anak usia Taman Kanak-Kanak (TK) dan Sekolah Dasar (SD). Dongeng Petra bersama Yayasan EduKasih (DORAYAKI) juga memberikan sumbangan fasilitas buku-buku anak yang akan ditaruh pada perpustakaan milik Yayasan EduKasih. Diharapkan upaya ini dapat berdampak positif bagi tercapainya kebutuhan pendidikan anak-anak usia Taman Kanak-Kanak (TK) dan Sekolah Dasar (SD) di daerah Eks Lokalisasi Dolly.

c. Kasus Ketiga

CSR *Badminton Clinic with Mizuno* (2022)

Mitra : Mizuno

Komunitas Sasaran : Yayasan Panti Asuhan Pondok Kasih Surabaya

Badminton Bersama Mizuno (2022)

Setelah melakukan beberapa persiapan, kelompok 4 sendiri memilih Mizuno serta UKM Badminton Universitas Kristen Petra sebagai mitra untuk mensukseskan jalannya Corporate Social Responsibility kepada Rumah Anak dari Yayasan Pondok Kasih. Pihak Universitas Kristen Petra bekerjasama dengan Mizuno hendak memberikan pelatihan bulutangkis sebagai pengembangan bakat dan keahlian kepada anak-anak dari Yayasan Pondok Kasih yang dinamai dengan *Badminton Coaching Clinic*. Program tim pelaksana ini diawali dengan adanya kunjungan survei yang terlaksana pada tanggal 16 April 2022 serta melakukan pencarian lapangan yang sekiranya dapat sesuai baik dari segi jadwal, jumlah lapangan yang ada, jarak perjalanan dan masih banyak lagi. Tidak hanya survei, ketika tim pelaksana hadir di Rumah Anak tim pelaksana juga disambut baik oleh beberapa pengurus sembari menyaksikan anak-anak yang sedang beribadah.

Kemudian, pada pertemuan kedua tanggal 26 April 2022 kelompok tim pelaksana mengadakan adanya *Technical Meeting* bersama UKM Badminton. Hal ini dilakukan sebagai pengarahan, penjelasan serta melakukan musyawarah terkait beberapa hal yang masih sekiranya perlu dilakukan adanya penyesuaian kembali. Dengan harapan para pelatih anak dapat memiliki gambaran terkait pengajaran *badminton* yang akan dilakukan selama melakukan empat kali pelatihan

bulutangkis di kedepannya. Berikutnya, hingga sampai pada akhirnya tim pelaksana melakukan pertemuan pertama di tanggal 7 Mei 2022 sebagai acara pembuka dimana tim pelaksana mengisinya dengan melakukan penyambutan, perkenalan, *ice breaking*, penyerahan simbolis, pengajaran materi yang disertai dengan pretest serta posttest dan masih banyak lagi. Tidak lupa meskipun di sana tim pelaksana bersenang-senang bersama tim pelaksana juga tetap menjaga protokol kesehatan untuk menghimbau terjadinya penularan Covid-19.

Pada pertemuan berikutnya di tanggal 14 Mei 2022 tim pelaksana mulai melakukan pelatihan bulutangkis secara fisik yang pertama yang berlokasi di Lapangan SIER. Selama melakukan pelatihan tim pelaksana juga meminta para pelatih dari UKM Badminton yang bertanggung jawab akan anak-anak dengan melakukan penilaian secara obyektif dari segi cara memegang raket, kemampuan lob, serta kemampuan cara melakukan servis sebelum dilakukan adanya pengajaran. Pada pelatihan pertama itu, meskipun terdapat adanya anak yang cidera karena keseleo pada akhirnya tim pelaksana dapat menanganinya dengan cara melakukan pengobatan pemijatan hingga anak yang bersangkutan dapat kembali melakukan pelatihan kembali. Setelah adanya hal tersebut, pada pertemuan kedua tim pelaksana melakukan adanya pemanasan secara bersama-sama sehingga dipastikan dari semua kelompok baik dari pelatih maupun peserta sudah melakukan pemanasan

dengan baik dan mengurangi adanya cedera. Tidak hanya itu, kelompok tim pelaksana juga sempat mengalami hambatan dimana pada gang yang merupakan lokasi rumah anak terdapat tenda pernikahan yang menghalangi adanya mobilisasi dari bus yang tim pelaksana fasilitasi kepada anak-anak ke lapangan SIER.

Namun tim pelaksana juga melakukan penanganan kendala tersebut dengan cukup baik di mana tim pelaksana pada akhirnya berjalan bersama dengan para peserta dari Rumah Anak dan bertanggung jawab akan keselamatan peserta selama melakukan jalan kaki dari rumah anak menuju tempat parkir bus. Pada pertemuan ketiga tanggal 21 Mei 2022, tim pelaksana menyelenggarakan kegiatan *Badminton Coaching Clinic* (BCC) 2022 secara onsite di Lapangan Badminton Sier. Pelatihan ini dimulai dengan doa pembuka yang dipimpin oleh moderator. Kemudian kegiatan selanjutnya adalah pengaplikasian bulutangkis yang dipimpin oleh Fungsionaris UKM Badminton UK.Petra. Selama kegiatan badminton, ada peserta yang mengalami cedera pada leher sehingga tim pelaksana sebagai panitia langsung membawa peserta tersebut ke klinik Sier.

Selanjutnya, tim pelaksana juga memberikan obat counterpain ke peserta tersebut. Dan kegiatan selanjutnya adalah foto bersama yang dipimpin oleh panitia dokumentasi serta tim pelaksana mengakhiri kegiatan ini dengan doa penutup. Setelah tim pelaksana melakukan doa penutup, tim pelaksana melakukan data

konsumsi kepada anak-anak Rumah anak Pondok Kasih dan *Coach* UKM Badminton UK. Petra. Pada pertemuan keempat yang terlaksana pada tanggal 28 Mei 2022, Tim pelaksana mengisi hari tersebut dengan adanya pemanasan bersama kemudian melanjutkan perlombaan yang diikuti dari peserta dengan peserta selama beberapa ronde dan juga mengadakan perlombaan antara pelatih ukm dengan pelatih ukm. Di hari tersebut tim pelaksana juga mengundang para awak media baik yang mewakili media Universitas Kristen Petra yaitu dari Persma dan juga Jawa Pos. Tidak lupa tim pelaksana juga menanyakan perasaan yang dirasakan selama mengikuti *Badminton Coaching Clinic* pada 4 empat kali pertemuan yang telah dilakukan. Setelah itu tim pelaksana kembali mengantar anak dari Lapangan SIER ke rumah anak sekaligus melakukan perpisahan. Dan terakhir, pada tanggal 10 Juni 2022, panitia memberikan laporan akhir kegiatan CSR kepada pengurus rumah anak.

Yayasan Pondok Kasih sebagai sasaran memiliki misi membantu anak-anak yang mengalami disfungsi dalam keluarga. Disfungsi ini terjadi karena kasus orang tua meninggal, perekonomian sehingga tidak mampu mengurus anak atau kasus perceraian orang tua. Berkaitan dengan sistem sosial budaya, sebagai sebuah institusi sosial, keluarga memegang fungsi penting dalam proses kehidupan anak. Keluarga sebagai institusi sosial memiliki beberapa fungsi yang sangat penting dalam

kehidupan masyarakat. Berikut adalah beberapa fungsi utama yang dilakukan oleh keluarga sebagai lembaga sosial:

1. Memenuhi Kebutuhan Biologis: Keluarga memenuhi kebutuhan biologis seperti makan, minum, dan tidur. Orang tua berperan sebagai pengasuh dan memberikan nutrisi yang diperlukan untuk pertumbuhan anak.
2. Memenuhi Kebutuhan Rohani: Keluarga juga memenuhi kebutuhan rohani, seperti memberikan kasih sayang, damai, cinta, aman, tentram, dan bahagia. Orang tua berperan sebagai pengasuh dan memberikan bimbingan spiritual kepada anak.
3. Membatasi Kebutuhan Manusia: Keluarga memberikan pedoman pada anggota keluarga lainnya tentang bagaimana mereka harus bersikap dan bertingkah laku. Orang tua berperan sebagai pengasuh dan memberikan contoh perilaku yang baik untuk anak.
4. Menjaga Keharmonisan Masyarakat: Keluarga berperan dalam menjaga keharmonisan hidup masyarakat. Orang tua berperan sebagai pengasuh dan memberikan bimbingan sosial kepada anak, sehingga anak dapat hidup dalam masyarakat dengan baik.
5. Mengendalikan Individu: Keluarga memiliki kekuatan sosial yang tidak dapat ditemukan pada lembaga lainnya, yaitu kemampuan mengendalikan individu secara terus menerus. Orang tua berperan sebagai pengasuh dan memberikan bimbingan sosial kepada

anak, sehingga anak dapat hidup dalam masyarakat dengan baik.

6. Sosialisasi Anak: Keluarga sebagai lembaga sosial pertama bagi anak. Di dalam lingkungan keluarga, anak mulai dilatih dan diperkenalkan cara-cara hidup bersama orang lain. Orang tua memperkenalkan anak tentang norma yang berlaku di masyarakat, seperti norma dan nilai-nilai sosial yang berlaku.
7. Pendidikan dan Pengasuhan: Keluarga berperan dalam pendidikan dan pengasuhan anak. Orang tua berperan sebagai pengasuh dan memberikan bimbingan sosial kepada anak, sehingga anak dapat hidup dalam masyarakat dengan baik.
8. Status dan Tanggung Jawab: Melalui lembaga perkawinan, seseorang akan mendapatkan status atau kedudukan baru di masyarakat, sebagai suami atau istri. Otomatis, ia akan diperlakukan sebagai orang dewasa dan mampu bertanggung jawab pada diri sendiri, keluarga, anak-anak, dan masyarakat.

Jika fungsi keluarga ini tidak bisa dijalankan dengan baik, maka anak mungkin akan tumbuh menjadi individu yang tidak bermoral, tidak sehat fisik/jasmani, tidak berpendidikan atau tidak bermasa depan cerah. Untuk itu Yayasan Pondok Kasih berupaya untuk menggantikan fungsi Sebagian fungsi keluarga dalam hal kesejahteraan fisik/jasmani dan pendidikan.

Dalam kegiatan sehari-hari Yayasan Pondok Kasih mengarahkan anak-anak Yayasan Pondok Kasih di mana pelajar taman kanak-kanak sebanyak 20 anak. Secara

keseluruhan terdapat 40 hingga 50 anak yang bersekolah di Yayasan Pondok Kasih yang berdomisili di Keputih. Dalam mengembangkan dan mengasah bakat minat di bidang seni terdapat ekstrakurikuler seperti paduan suara / choir. Sedangkan dalam bidang kebugaran fisik terdapat seni bela diri taekwondo, karate, serta renang.

Yayasan Pondok Kasih memiliki total anak dalam program Rumah Anak sejumlah 40 orang yang saat ini sedang menempuh pendidikan dari SD hingga SMA. Dalam melaksanakan programnya, YPK memiliki apresiasi terhadap pendidikan dan peningkatan taraf hidup yang tergambar pada metode *holistic*, *integrated*, *sustainable*, *transformational*, visi, dan misi. Visi Yayasan adalah “pribadi-pribadi yang bertumbuh memiliki karakter yang baik, mandiri, dan menjadi agen perubahan dalam menciptakan perdamaian dan keharmonisan bangsa” dan misi “melayani kaum pra sejahtera untuk meningkatkan kualitas hidup mereka; agar menjadi pribadi yang utuh, bermartabat, dan berguna bagi sesama, bangsa, dan Tuhan; dengan bekerja bersama seluruh komponen masyarakat”. Dalam pelaksanaan program, Yayasan Pondok Kasih bekerjasama dengan pemerintah dalam hal pemenuhan hak sipil anak seperti penerbitan akta kelahiran. Beberapa kegiatan telah disusun berdasarkan jadwal. Namun dalam hal rutinitas berkumpul bersama, anak-anak akan berkumpul di waktu doa bersama dan bermain bersama.

Pada masa pandemi, ada beberapa kekurangan dalam keseharian di Rumah Anak. Yang pertama, selama pandemi COVID-19, adanya regulasi dari pemerintah

Indonesia yang melarang adanya aktivitas belajar-mengajar di sekolah secara langsung. Oleh karena itu, anak-anak di Yayasan Pondok Kasih, harus bersekolah secara daring, membuat kegiatan kebugaran fisik menjadi terbatas, padahal menurut *Victoria State Government, Department of Health dan The University Melbourne* olahraga sangat penting bagi anak-anak karena akan mengurangi resiko obesitas; memicu pertumbuhan tulang, otot, ligamen, dan tendon; meningkatkan koordinasi dan keseimbangan anak, meningkatkan tidur, meningkatkan kemampuan sosial, meningkatkan kemampuan personal, dan lain-lain. Jadi penting bagi anak-anak untuk melakukan kebugaran fisik sehari-hari.

Oleh karena itu, tim pelaksana mengadakan Badminton Coaching Clinic untuk anak-anak di Rumah Anak Yayasan Pondok Kasih, dengan harapan generasi muda di Yayasan Pondok Kasih bisa mendapatkan fasilitas berolahraga (badminton) secara gratis, yakni memberikan raket secara gratis dan memberikan edukasi dan pelatihan tentang badminton. Tujuan dari kegiatan ini adalah generasi muda di Yayasan Pondok Kasih bisa merasakan semangat dalam berolahraga, mengetahui dan menguasai teknik dasar bulutangkis, serta memberikan kesehatan bagi tubuh.

d. Kasus Keempat

CSR Pemberantasan Buta Huruf (2023)

Mitra : Faber Castell

Komunitas Sasaran : Anak-anak di Kawasan Kalisari

Damen Surabaya Timur

Pemberantasan Buta Huruf bersama Faber Castell (2023)

Berdasarkan pemetaan masalah di awal perencanaan ditemukan bahwa kemampuan literasi di lokasi sasaran kurang baik. Untuk itu diadakan kerjasama antara Faber Castell dan tim pelaksana untuk melakukan kegiatan di waktu sela anak, dalam hal menulis, membaca dan menggambar. Sabtu, 6 Mei 2023, pertemuan I pelatihan membaca & menulis. Pada pertemuan pertama lebih banyak pengenalan akan baca tulis. Seperti bernyanyi ABC, Tebak kata (baca), Tebak gambar; tulis di papan, lomba, tes dengar & tulis dengan memutar film Si Kancil dan Buaya, lalu menjawab 5 pertanyaan dengan menulis. Sabtu, 13 Mei 2023, pada pertemuan kedua kelas dibagi menjadi 2 yaitu kelas kecil dan kelas besar. Kelas kecil Mengerjakan modul 3 halaman (menulis huruf - kata - kalimat) dilanjut dengan sesi aktivitas yaitu menggambar dan mewarna. Kelas besar belajar mengenai tanda baca dan dilanjut dengan sesi menulis karangan dan gambar mengenai "cita-citaku". Sabtu, 20 Mei 2023, kelas pada pertemuan ini dibagi menjadi 2 juga untuk kelas kecil bernyanyi dan bermain puzzle susun kata dari lagu "Naik Kereta Api" dan "Lihat Kebunku" lalu mengerjakan modul "Lihat dan Tulis". Disambung dengan aktivitas lepas yaitu menggambar dan mewarnai. Sedangkan di Kelas Besar aktivitasnya yaitu menulis kalimat berdasarkan gambar disambung dengan mengerjakan LKS membuat kalimat sesuai

gambar mewarnai gambar tema lingkungan. Kegiatan di pertemuan keempat dibagi 2 kelas, untuk kelas kecil menonton film animasi pendek Malin Kundang dan mengerjakan LKS Malin Kundang (menulis dan mewarnai). Dilanjut dengan modul gambar dan menulis kalimat mengenai hal yang disukai. Kelas besar belajar membaca sebuah paragraf kemudian dilanjut dengan membaca cerita pendek menggambar interpretasi sesuai tema bacaan. Pada 3 Juni 2023 terdapat *Closing - Workshop* bersama Faber-Castell dan penyuluhan regulasi paket A. Kegiatan pada hari terakhir ini kedua kelas yaitu besar dan kecil digabung, dan kegiatan ini diisi dengan rangkaian kegiatan yang disiapkan oleh kakak-kakak dari Faber Castell. Kejadiannya yaitu cara mewarnai dengan berbagai macam cara, dan gambar yang diwarnai oleh anak-anak akan dilombakan.

Sekolah sebagai salah satu institusi sosial dalam sistem sosial budaya. Ia memiliki peran yang besar dalam membentuk diri anak. Pendidikan merupakan hal yang sangat penting pada proses pengembangan kehidupan manusia, yaitu sebagai sarana atau jembatan untuk dapat mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang didapatkan. Hal ini tidak terlepas dari adanya proses transmisi ilmu, yang mana pendidikan merupakan bentuk proses komunikasi yang mengandung transformasi pengetahuan, nilai-nilai, dan keterampilan-keterampilan di dalam dan di luar sekolah yang berlangsung sepanjang hayat dari generasi ke generasi.

Mendapatkan pendidikan adalah hak mutlak setiap individu seperti yang tertulis dalam UUD 1945 pasal 31 Ayat 1 yang menyebutkan bahwa: “setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan”. Namun pada kenyataannya tingkat pendidikan di Indonesia masih sangat rendah dan tidak semua individu terutama anak-anak usia sekolah yang mendapatkan kesempatan untuk memperoleh pendidikan yang layak.

Permasalahan pendidikan di Indonesia berhubungan langsung dengan masalah literasi. Literasi menurut *National Institute for Literacy* merupakan suatu kemampuan dari tiap individu dalam membaca, menulis, berbicara, menghitung serta juga memecahkan suatu masalah pada tingkat keahlian yang diperlukan didalam suatu pekerjaan, keluarga dan masyarakat. Mirisnya, masalah literasi masih belum terselesaikan di Indonesia dan membutuhkan perhatian. Berdasarkan data dari Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNESCO), disebutkan bahwa angka minat baca di Indonesia hanya mencapai 0,001% yang mana dapat diartikan bahwa diantara 1000 orang Indonesia, hanya 1 orang yang suka membaca. Selain itu, fakta lain juga ditunjukkan dari survei yang dilakukan *Program for International Student Assessment (PISA)* yang di rilis oleh *Organization for Economic Co-operation and Development (OECD)* pada 2019, Indonesia menempati peringkat ke 62 dari 70 negara, atau merupakan 10 negara terbawah yang memiliki tingkat literasi rendah (Novrizaldi, 2021). Surabaya merupakan kota yang cukup berhasil secara prosentase dalam upaya

meningkatkan partisipasi anak sekolah. Adapun jumlah persentasenya adalah 99.4% pada tahun 2021. Tersisa 0.6% anak-anak di Surabaya yang tidak aktif bersekolah di level sekolah dasar.

Hal ini tercermin pada kondisi masyarakat yang tinggal di Jl. Kalisari Damen, Kalisari, Kec. Mulyorejo yang memiliki sejumlah anak tidak atau putus sekolah dasar. Para orang tua mereka berasal dari berbagai kota di pulau Jawa yang merantau ke Surabaya untuk mengadu nasib. Adapun tidak terlalu mudah untuk mendapatkan pekerjaan maupun tempat tinggal sehingga mereka mendirikan rumah semi permanen di pinggir kali. Dalam keseharian pekerjaan utama para orang tua ini adalah menjadi pemulung, perawat taman perumahan, pembantu rumah tangga maupun pekerjaan kasar lainnya. Sebagian besar para orang tua ini tidak memiliki KTP Surabaya dan kesulitan mendapatkannya karena tidak memiliki pekerjaan tetap sebagai persyaratan memiliki tanda warga Surabaya. Akibatnya proses menyekolahkan anak menjadi terhambat. Bukan hanya hal itu, faktor ekonomi juga menyebabkan sebagian orang tua menghentikan proses sekolah anak-anaknya. Kenyataan ini perlu diantisipasi dan diatasi supaya anak-anak tetap memiliki kesempatan berpengetahuan dasar, misalnya membaca dan menulis. Lebih lanjut lagi kemampuan dasar ini sangat mendukung pemahaman akan lingkungan sekitar mereka dan untuk mempertahankan hidup di masa mendatang. Dalam proposal ini kami mengusung peningkatan kemampuan literasi untuk anak-anak tersebut. Kesenjangan kemampuan literasi dialami oleh berbagai

usia yaitu anak hingga dewasa, namun tentunya anak-anak menjadi perhatian khusus karena pada masa ini merupakan penentu kemampuan dasar literasi yaitu kemampuan membaca dan menulis.

Membaca dan menulis merupakan keterampilan dasar yang wajib dimiliki setiap orang terlebih anak-anak yang hendak menempuh bangku sekolah dasar. Keterampilan membaca dan menulis merupakan pengetahuan tingkat dasar dimana seseorang dapat mengenal huruf dan kata. Pakar edukasi menganggap keterampilan tersebut merupakan kemampuan yang sangat penting untuk memudahkan komunikasi dalam bentuk lisan dan tulisan. Umumnya, pembelajaran membaca dan menulis berlangsung terutama pada pendidikan formal yaitu sekolah. Fenomena yang kerap terjadi yaitu seringkali ditemui anak yang benar-benar tidak bersekolah. Mirisnya, hal tersebut menciptakan gap seperti: mereka mungkin tahu huruf dan angka, namun tidak dapat membaca; mereka mungkin memahami uang, tetapi tidak dapat menghitungnya. Tahapan inisiasi ini banyak dipelajari dan dikembangkan dalam pengembangan metode literasi dasar. Seharusnya kegiatan membaca dan menulis sudah menjadi tugas sehari-hari anak usia sekolah, namun berbeda dengan siswa remaja/dewasa yang tidak membutuhkan teori baca-tulis seperti itu walau pada kenyataannya diketahui putus sekolah. Menurut data statistik dari Badan Pusat Statistik, persentase anak remaja berusia 15 tahun di Jawa Timur yang dapat buta huruf berjumlah 7,50%. Pada tahun 2021, persentase ini menurun hingga 0,6% dimana

angka buta huruf remaja di Jawa Timur mulai menginjak angka 7,44%. Pada akhir tahun 2022, angka ini terus membaik dan menyentuh angka 6,68%. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan membaca dan menulis pada anak remaja sangat berpengaruh pada perkembangan persentase penduduk buta huruf di Jawa Timur.

Analisis PESTEL digunakan untuk mencari permasalahan atau hal yang menjadi perhatian pada komunitas WePOSE sebagai fokus dilakukannya kegiatan CSR Literasyik, komponen PESTEL yang memenuhi diantaranya:

1. Sosial (*Social*)

Terdapat kesenjangan pada anak-anak komunitas WePOSE. Terdapat anak yang bersekolah, tidak bersekolah, dan putus sekolah. Kemampuan beragam dalam hal membaca dan menulis. Ada anak yang sudah bisa membaca dan menulis, membaca saja, atau tidak dapat membaca maupun menulis di rentang usia yang berbeda-beda. Namun yang menjadi permasalahan yaitu anak yang sudah di usia sekolah dasar, bahkan di atas 10 tahun namun tidak lancar membaca dan menulis.

Selain itu, minat baca pada anak-anak juga masih rendah yang mana juga sedikit-banyak dipengaruhi oleh orang tua yang (kebanyakan) berlatar belakang tidak bersekolah.

Upaya yang dilakukan: menyediakan pelatihan membaca dan menulis untuk anak-anak yang memberikan perhatian pada tingkat pengetahuan dan

jenjang atau rentang usia anak dengan penuh perhatian dan variasi kegiatan menarik serta interaktif.

2. Politik (*Political*)

Salah satu alasan masih terdapat anak-anak yang tidak bersekolah di kawasan tersebut diketahui karena adanya aturan pada birokrasi pemerintahan, dimana orang tua mengalami kesulitan mengurus dokumen-dokumen yang diperlukan untuk pendaftaran sekolah, seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) maupun Akta Kelahiran. Hal ini tentunya perlu menjadi perhatian Pemerintah Kota Surabaya untuk memberikan bantuan dalam hal birokrasi dan mendukung hak asasi anak untuk memperoleh pendidikan yang layak (UU No. 39 Tahun 199, pasal 60).

Upaya yang dilakukan: Kelompok dengan bantuan dosen ataupun pihak penggerak komunitas peduli anak WePOSE dapat membantu dan atau menyarankan bantuan dari Walikota Surabaya melalui fasilitas kota yang ada seperti Media Center Surabaya, Forum Anak Surabaya (FAS), WargaKu, Sambat Nan Cak Eri, dan lain sebagainya.

3. Ekonomi (*Economic*)

Diketahui bahwa pada wilayah WePOSE tersebut merupakan kawasan tempat tinggal penduduk kelas bawah hingga menengah ke bawah dan juga kategori kelompok marjinal. Hal tersebut juga menjadi salah satu alasan banyak orang tua memilih untuk tidak menyekolahkan anaknya hingga ada juga yang mengharuskan mereka untuk bekerja.

Upaya yang dilakukan: Menyediakan bantuan berupa

buku dan penyediaan fasilitas belajar, hingga pelatihan yang gratis.

Berdasarkan identifikasi masalah yang ada, tim pelaksana menawarkan sebuah solusi berupa kegiatan CSR yaitu pelatihan membaca dan menulis bagi anak-anak di komunitas WePOSE (We Different but One Purpose) Surabaya. Anak-anak selaku target sasaran ini akan diberi pemahaman yang berbentuk pelatihan dengan tujuan untuk mengenalkan pentingnya membaca dan menulis baik kepada anak-anak juga kepada orang tua secara tidak langsung. Selain itu hal yang paling penting dan sangat dibutuhkan adalah pelatihan atau belajar membaca dan menulis melalui modul kegiatan yang nantinya akan dibagikan secara personal kepada seluruh target sasaran. Kegiatan CSR ini nantinya akan dimulai dari pengumpulan buku (*charity*/donasi) yang sesuai dengan kebutuhan target sasaran yaitu anak-anak yang ingin mengejar paket A. Selanjutnya kegiatan ini akan dilanjutkan dengan pelatihan membaca dan menulis. Lalu kegiatan ini akan ditutup atau diakhiri dengan pemberian penghargaan kepada anak-anak komunitas WePOSE.

Daftar Referensi

- Aji, R.S., *Migrasi Etnis Madura di Surabaya Tahun 1906-1942*, Universitas Airlangga, 2014.
- Koentjaraningrat, *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*, Jakarta, Jambatan.
- Lawang, Robert M.Z., *Sistem Sosial Indonesia I*, Jakarta, Universitas Terbuka, 1999.
- Nasikun, *Sistem Sosial Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers, 2001.
- Novrizaldi, *Tingkat Literasi Indonesia Memprihatinkan*, Kemenko PMK Siapkan Peta Jalan Pembudayaan Literasi Nasional, Kemenko PMK, 2021
- Poloma, Margaret M., *Sosiologi Kontemporer*, Jakarta, C.V. Rajawali Pers, 1984.
- Rabushka, Alvin and Shepsle, Kenneth A., *Politics in Plural Societies, A Theory of Democratic Instability*, Ohio, Charles E. Merrill Publishing Company.
- Ricotty, P., *Corporate Responsibility and Sustainable Development*, Niccolo' Cusano University, 2003
- Rishi & Moghe, *Integrating Corporate Social Responsibility and Culture as a Strategy for Holistic Corporate Success in India*, The Journal of Corporate Citizenship, 2013
- Ritzer, George & Goodman, Douglas J., *Modern Sociological Theory*, diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh Triwibowo Budi Santoso, Penerbit Kencana, 2003.

Santoso, Thomas, *Sosiologi & Politik*, UK Petra, 1998.
Vlahovic & Gregory, *Public Relations Model of a Socially
Responsible Company*, Medianali, 2010.

Riwayat Hidup

Thomas Santoso, lahir di Bandung, 6 September 1959. Lulus dari Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga, Surabaya, tahun 1984. Pada tahun 1994 lulus *Cum Laude* dari Program Magister Ilmu-Ilmu Sosial pada Program Pascasarjana Universitas Airlangga. Terpilih sebagai wisudawan terbaik Universitas Airlangga tahun 1994. Lulus Doktor Ilmu Sosial pada Program Pasca Sarjana Universitas Airlangga tahun 2002. Saat ini menjadi dosen (Guru Besar) pada Fakultas Bisnis dan Ekonomi Universitas Kristen Petra. Beberapa buku yang pernah ditulis, antara lain, *Ilmu Budaya Besar* (Penerbit UK Petra, 1985); *Ilmu Sosial Dasar* (Penerbit UK Petra, 1985); *Beginikah Kemerdekaan Kita?* (bersama Dr.med. Paul Tahalele, DSB/T., Penerbit FKKS-FKKI, 1997); *The Church and Human Rights in Indonesia* (bersama Dr.med. Paul Tahalele, DSB/T., SCCF-ICCF, 1997); *Ilmu Budaya Dasar* (bersama Dr. L. Dyson, M.A, Penerbit Citra Media, 1997); *Panggilan Dan Tanggungjawab Menghadapi Masa Depan Bersama* (Anggota Tim Penyusun Buku Putih PGI, 1997); *Jangan Menjual Kebenaran* (bersama Dr.med. Paul Tahalele, DSB/T., Penerbit FKKI, 1998); *Sosiologi dan Politik* (Penerbit UK Petra, 1998); *Supplement The Church and Human Rights in Indonesia* (bersama Dr.med. Paul Tahalele, DSB/T., SCCF-ICCF, 2001); *Indonesia Di Persimpangan Kekuasaan. Dominasi Kekerasan Atas Dialog Publik.*

(Editor bersama Dr.med. Paul Tahalele, DSB/T. dan Drs. Frans Parera, The Go-East Institute, 2001); Etnometodologi dan Beberapa Kasus Penelitian Sosial (dalam Burhan Bungin (Ed), *Metode Penelitian Kualitatif*, Rajawali Pers, 2001); *Teori-Teori Kekerasan* (Penerbit Ghalia, 2002); *Kekerasan Agama Tanpa Agama* (Penerbit Pustaka Utan Kayu, 2002); *Orang Madura dan Orang Peranakan Tionghoa* (Penerbit Lutfansah Mediatama, 2002); *Juragan dan Bandol* (Penerbit Lutfansah Mediatama, 2002); *Mobilisasi Massa* (Penerbit Lutfansah Mediatama, 2003); *Peristiwa Sepuluh-Sepuluh* (Penerbit Lutfansah Mediatama, 2003); *Kebebasan Beragama : Bunga Rampai Kehidupan Berbangsa* (Pusat Studi Etika dan Sosio Religiositas UK Petra, 2015). *Meneropong Kekerasan Politik Agama di Indonesia* (Pustaka Saga, 2016), *Konflik & Perdamaian* (Pustaka Saga, 2019), *Memahami Modal Sosial* (Pustaka Saga, 2020), *Virtual Capital* (Pustaka Saga, 2021), *Pasang Surut Nasionalisme*, (Pustaka Saga, 2021), *Political-Religious Violence In Indonesia* (Pustaka Saga, 2021), Dekonstruksi Kekerasan Politik dan Kriminalitas, dalam Doddy Sumbodo Singgih (Editor), *Merajut Pemikiran Sosiologi Kontemporer Dari Tahun 1976-2021*, Departemen Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga, 2021; *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Pustaka Saga, 2022); *Etika Bisnis* (Pustaka Saga, 2022); *Pancasila* (Pustaka Saga, 2023); *Filsafat Ilmu* (Pustaka Saga, 2023).

Astri Yogatama, lahir di Malang, 24 Oktober 1975. Lulus dari Jurusan Kesekretarian, Politeknik Negeri Malang tahun 1997. Selanjutnya lulus dari Jurusan Ilmu Administrasi Niaga, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya Malang, pada tahun 2001. Pada tahun 2009 menyelesaikan Program Magister Komunikasi dan Studi Media pada Fakultas Ilmu Sosial dan Politik dengan peminatan Public Relations dari Universitas Airlangga. Saat ini aktif sebagai pengajar dan peneliti di Program Studi Ilmu Komunikasi, Program Komunikasi Strategis di Universitas Kristen Petra, Surabaya. Buku dan modul yang pernah ditulis antara lain Pengantar Relasi Publik (CV. Penerbit Qiara Media, 2021), Modul Manajemen Komunikasi Strategis (tidak diterbitkan). Saat ini aktif dalam kegiatan Corporate Social Responsibility berdana hibah pemerintah (2023), pengembangan modul digital (2021), penelitian berfokus pada manajemen komunikasi (2009-2023) dan pengabdian masyarakat berfokus pada green economy (2023).